



VOLUME XI / NO. 102 / MARET 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

ISSN 1907-6320



KUALITAS BELANJA JADI PRIORITAS

Belanja negara yang berkualitas, baik di pusat maupun daerah akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Yang mendorong pertumbuhan seyogianya diutamakan.

Daftar Isi



Foto Cover
Aditya
Arifiyanto

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. **Ketua Pengarah:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti. **Redaktur Unit Eselon I:** Arief Rahman Hakim (DJBC), Pilar Wirotama (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), M. Hijrah (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Noer Anggraini (DJPU), Dwinanto (DJKN). **Redaktur Foto:** Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fransiskus Edy Santoso, Tino Adi Prabowo, Eko Priharyanto Wibowo, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu M., Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri H., Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Gondo Harto, Cahya Setiawan, Andreas Rossi, Arif Nur Rokhman, Arfan Sahrul Ramadhan, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Victorianus M.I. Bimo Adi, Nur Muhlisin. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

LAPORAN UTAMA

- 13 Pemimpin Bagus dan Belanja yang Terfokus
- 16 Infografis
- 18 Penyerapan Tepat Sasaran
- 21 Belanja Daerah Berkualitas, Masyarakat Sejahtera
- 23 Demi Eksekusi Belanja Merata

REPORTASE

- 25 Bangun Optimisme Perekonomian 2016
- 26 Pemerintah Resmi Tawarkan Sukuk Ritel Seri SR-008

WAWANCARA

- 27 SMF Percepat Pembangunan Perumahan Rakyat

POTRET KANTOR

- 30 Inovasi Mengubah Keterbatasan Jadi Prestasi

FIGUR

- 32 Hidup dengan Perjuangan

EKONOMI TERKINI

- 36 Mengubah Tantangan Menjadi Kesempatan

KOLOM EKONOM

- 40 Pajak Emisi Gas Buang Dan Ketahanan Energi

GENERASI EMAS

- 44 Lulusan Harvard yang Memilih Pulang

OPINI

- 46 Tax Amnesty

REGULASI

- 48 Pemerintah Bebaskan PPN Rusunami.

INSPIRASI

- 50 Petikan Dawai Tommy

RENUNGAN

- 52 Keluarga Tujuan Akhir

BUKU

- 53 "The Big Short": Film Berat yang Terasa Ringan

JALAN-JALAN

- 54 Mengakrabkan Diri Dengan Togeang

SELEBRITI

- 56 Masih Optimis

57 BUNG PISKAL

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



PUSAT LAYANAN DJA



layanan.
help desk simponi
revisi anggaran
permohonan informasi & dokumentasi
pengaduan

jam layanan.
setiap hari kerja
07.30 - 17.00 wib

tel.
021 348 32511 (call center)

fax.
021 34832515 (fax)

email.
pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id

website.
www.anggaran.depkeu.go.id



Dari Lapangan Banteng

Belanja Tepat Pertumbuhan Meningkat

Perjalanan Media Keuangan sebagai majalah kebanggaan Kementerian Keuangan memasuki tahap baru. Berdekatan dengan penerbitan edisi ke-100, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Jenderal Hadiyanto melakukan peluncuran aplikasi iOS dan android majalah ini pada Kamis (4/2) di Jakarta. Inovasi dan kerja solid tim adalah kunci yang membuat Media Keuangan dapat terus berkembang selama sebelas tahun terakhir.

Sejumlah prestasi membanggakan juga berhasil dimenangkan. Pada ajang InHouse Magazine Awards yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Lombok awal bulan Februari, Media Keuangan menyabet dua penghargaan, yaitu *Gold Winner* untuk sampul majalah Media Keuangan Volume X | No. 91/April 2015 dan *Silver Winner* untuk sampul Media Keuangan Volume X | No. 95/Agustus 2015. Kami ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mewarnai perjalanan pengelolaan Media Keuangan selama ini. Dukungan, dalam bentuk apapun, telah dan akan selalu menjadi bahan bakar yang menyalakan semangat kami menghadirkan transparansi informasi kebijakan fiskal di tengah-tengah Anda.

Pada edisi Maret, kami secara khusus mengulas isu perlunya memperbaiki kualitas belanja. Dalam kondisi ekonomi global yang belum benar-benar membaik, belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah, akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Sejumlah tantangan perlu segera dijawab oleh para pemimpin kementerian dan lembaga (K/L) serta kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah *disbursement* anggaran yang tidak merata,

pengeluaran yang inefisien, dan kekhawatiran sejumlah pimpinan K/L dan kepala daerah terhadap permasalahan hukum dalam pengelolaan anggaran.

Dari data sementara Direktorat Jenderal Anggaran, realisasi belanja negara pada APBNP 2015 mencapai 90,5 persen. Hasil ini tidaklah buruk. Namun, masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkannya. Pemerintah pusat sudah melakukan inovasi dengan percepatan penyelesaian kontrak di awal tahun. Hasilnya, penyerapan anggaran bulan Januari lalu jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Peluang juga muncul dari optimalisasi peran Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) tahun ini di mana Menteri Keuangan berperan sebagai Tim Pengarah dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bertindak sebagai Ketua Harian.

Yang tidak kalah penting, persoalan belanja erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan. Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di kementerian masing-masing sungguh patut dicontoh. Begitu juga langkah beberapa kepala daerah yang melakukan perombakan dan *monitoring* APBD hingga menghasilkan postur yang berkualitas dan belanja yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai inspirasi, Media Keuangan menghadirkan cerita Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengelola belanja pada edisi ini.

Selamat membaca!

**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
@KemenkeuRI**

Menurut kamu, program apa yang harus menjadi prioritas pemerintah di daerahmu?

A D @agadhanysp
pembangunan infrastruktur, serta pendidikan terutama pendidikan moral!

LPKKI @LPKKI1
Didaerah tempat sy untuk mempermudah pinjaman maka pd tingkat Rt(rukun tangga) ada simpan pinjam tiap bulan rapat

DN. IPUNG™ @IpungEI
program infrastruktur, dan pengadaan pupuk petani yg mash tergolong sulit untk didapat #sumenep madura

Rangga Syatria @R_Syatria
infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan keamanan #OpiniAnda

EKI TIRTAKUSUMAH @TIRTAKUSUMAH_
prgram prioritas yg diutamakan (Bandung) adlh revitalisasi sungai citarum yg hingga skrg masih jd penyebab banjir #opinianda

Punardiono @punardionosays
program pemberantasan KKN, pungli dan sebagainya

tweet

www.kemenkeu.go.id Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI Kemenkeu RI kemenkeuri

Perempuan Komandan

Ada pemandangan menarik pada upacara peringatan Hari Pabean Internasional ke-64 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Selasa (26/1). Mira Puspita Dewi, Kepala Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, bertindak sebagai komandan upacara. Keberadaan komandan perempuan ini menegaskan adanya kesetaraan gender dan kesempatan di lingkungan DJBC.



Foto
Dovan Wida
Perwira



Yang Asli Selalu Dicari

J ejak-jejak budaya Tiongkok dapat ditemui di sentra pembuatan keramik di Singkawang, Kalimantan Barat. Proses produksi, mulai dari tahap pembentukan, pengeringan, pengecatan, sampai pembakaran di dalam tungku mempertahankan cara yang dilakukan turun-temurun. Konon, generasi pertama di Desa Sakok, salah satu desa penghasil keramik di Singkawang, adalah orang asli negeri Tiongkok. Untuk alasan keaslian, keramik Singkawang masih banyak dicari hingga kini.

Foto
Muhammad
Ardani





Media Keuangan Menangkan Dua Penghargaan di Ajang InMA 2016

10/02

Teks Arfindo Briyan
Foto Bagus Wijaya

Media Keuangan, sarana publikasi cetak resmi Kementerian Keuangan memenangkan dua penghargaan dalam kompetisi sampul muka media internal korporasi dan lembaga, Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2016, pada Rabu (10/02) di Hotel Grand Palace, Mataram. Kedua penghargaan tersebut adalah Gold Winner untuk sampul majalah Media Keuangan Volume X | No. 91/ April 2015 dan Silver Winner untuk sampul Media Keuangan Volume X | No. 95/Agustus 2015. Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) periode 2015-2019 Dahlan Iskan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan N.E. Fatimah.



Menkeu Lantik 48 Pejabat Eselon II Baru Kemenkeu

18/02

Teks Biro KLI
Foto Tino

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik 48 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis (18/02). Pelantikan berlangsung di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, dan beberapa pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Pelantikan pejabat Eselon II ini meliputi promosi dan mutasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

BPPK Gelar Program Edukasi Keuangan Negara Bagi Pemerintah Bangladesh

15-19/02

Teks BPPK
Foto BPPK

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan program edukasi keuangan negara, bagi 17 pegawai negeri sipil Bangladesh. Delegasi Pemerintah Bangladesh direncanakan memperdalam ilmu mengenai sistem anggaran yang diterapkan di Indonesia, selama 5 hari (15 - 19 Februari 2016). Benchmarking Training Program dalam bentuk pelatihan singkat ini merupakan kerja sama dua negara untuk memperkuat pemahaman dalam bidang penganggaran dan perbendaharaan. Menurut Kepala BPPK Sumiyati, pelatihan ini akan disajikan dalam bentuk diskusi dan tukar pemahaman dan pengalaman di masing-masing negara.



10/02

Teks Dok. Biro KLI
Foto Dok. DJPB

Wamenkeu Resmikan KPPN Khusus Penerimaan dan Investasi

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meresmikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Investasi pada Rabu (10/2) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, Jakarta. Peresmian kedua KPPN khusus ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang nyata bagi pengelolaan penerimaan dan investasi pemerintah serta mendukung modernisasi tata kelola keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada tahun 2016 ini.



Dukung Gerakan Nasional Nontunai, Kemenkeu Luncurkan Cashless Zone

12/02

Teks Dok. Biro KLI
Foto Dok. DJPB

Untuk mendukung program transformasi kelembagaan dan menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan Zona Bebas Tunai (cashless zone) di Lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (12/2) di kompleks Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta.



DJA Sosialisasikan Pokok-Pokok Kebijakan Penganggaran ke K/L dan APIP

12/02

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

Direktorat Jenderal Anggaran menggelar Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan Anggaran kepada kementerian/lembaga (K/L) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Jumat (12/2) di Auditorium Gedung Dhanapala. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyampaikan pentingnya evaluasi untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik pada tahun 2016 ini. "Penting bagi kita untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan di 2015 agar pengelolaan anggaran yang lebih baik di tahun 2016, seperti diamanatkan oleh Presiden," ungkapnya.



Daerah

11/02

Teks DJBC
Foto DJBC

KPPBC Juanda Gagal Penyelundupan Shabu

Kamis (11/2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo mengadakan konferensi pers Penggagalan Penyelundupan Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu) melalui Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Juanda. Acara dilaksanakan di Aula KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan dibuka secara langsung oleh Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Penyelundupan Narkotika jenis *Methamphetamine (shabu)* seberat 1.595 gram ini dilakukan oleh dua orang warga Indonesia berjenis kelamin perempuan. Mereka merupakan penumpang pesawat Air Asia XT-325 rute Kuala Lumpur – Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016. Adapun estimasi nilai dari 1.595 gram *Methamphetamine (shabu)* tersebut adalah Rp 2,392 miliar.



Daerah

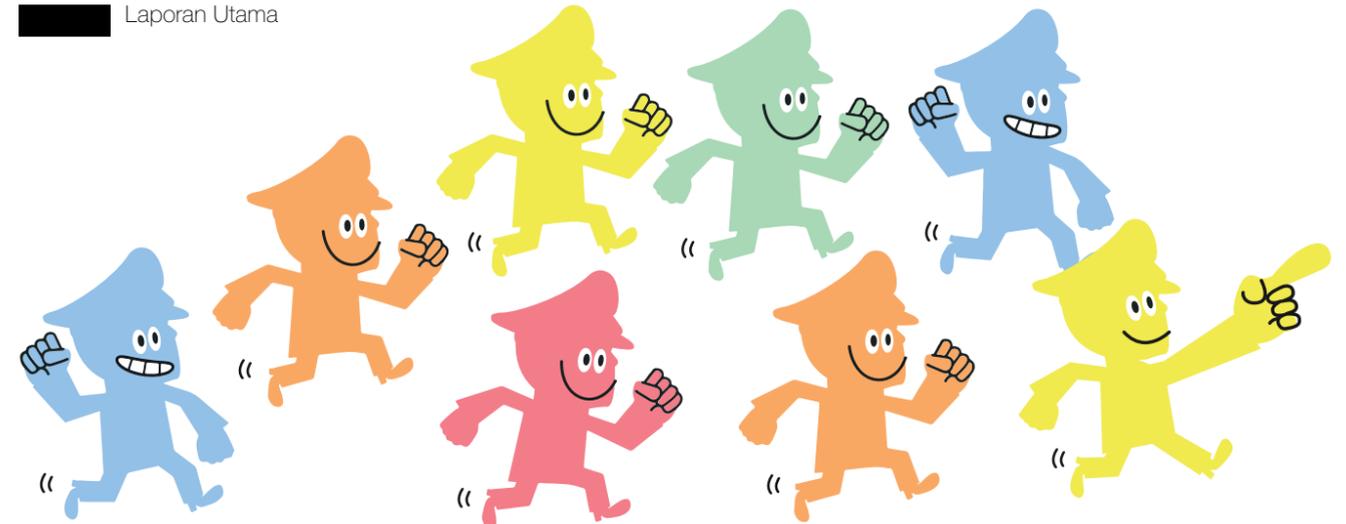
09/02

Teks DJBC
Foto DJBC

Bea Cukai Pekanbaru Amankan Methampethamin

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru telah berhasil mengamankan dua buah kapsul yang berisikan bahan narkotika terlarang berjenis *Methampethamin (sabu - sabu)* seberat 263 gram. Penangkapan terjadi pada Selasa (9/2) di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru di pintu kedatangan internasional. Para petugas Bea dan Cukai berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai kurir untuk barang-barang terlarang ini. Pada saat dilaksanakan konferensi pers, Rabu (10/02), tersangka MI (insial) mengaku telah melakukan kegiatan ini sebanyak lima kali.

- 04/03 Sun Goes to Campus, di Universitas Jambi
- 8/03 Foreign Policy Lunch di Mezzanine Djuanda I
- 8/03 JP Morgan Investor Meeting "Indonesia Fiscal Priorities" di Raffles Hotel
- 9-20/03 9-20 Maret 2016, Road Show SUKUK Valas, di Timur Tengah (Menteri Keuangan berencana hadir)
- 10/03 Penutupan Orientasi Pegawai Baru di Mezanine Djuanda I
- 11/03 Maret 2016, *Global Tax Policy Conference* di Dublin Irlandia
- 11/03 SUN Goes to Campus, di Universitas Gajah Mada (UGM)
- 25/03 Andalas Accounting National Events di Aula Gubernur Sumatra Barat
- 30/03 Rakertas PNKNL di Jakarta



Pemimpin Bagus dan Belanja yang Terfokus

Implementasi arahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kontrak-kontrak lelang program APBN sejak awal tahun mulai menunjukkan hasil. Selama bulan Januari, realisasi belanja pemerintah, yang didorong dari penandatanganan kontrak proyek infrastruktur, sudah mencapai delapan persen. Khusus untuk belanja modal, jumlah yang dikeluarkan tak kurang dari Rp1,5 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, belanja modal pemerintah baru Rp100 miliar.

Salah satu kementerian yang telah menyelesaikan banyak kontrak sejak dini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera). Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/2), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan bahwa proyek siap lelang Kementerian PU dan Pera adalah salah satu yang terbesar, yaitu mencapai Rp60 triliun.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Presiden Jokowi memang memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan belanja negara. Selain soal percepatan penyerapan, pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja. Yang diutamakan adalah kualitas belanja dengan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam APBN 2016, belanja modal ditingkatkan anggarannya. Belanja modal khusus untuk pembangunan infrastruktur bahkan meningkat pagunya menjadi Rp320 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp290 triliun.

Fokus belanja untuk infrastruktur bukan tanpa dasar. Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi selama tiga tahun terakhir menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, yaitu 0,58 persen (2013), 0,66 persen (2014), dan 0,64 persen (2015). Selain konstruksi, industri pengolahan juga menyumbang pertumbuhan yang besar, yaitu 0,96 persen, 1 persen, dan 0,92 persen. Dengan memprioritaskan belanja pada kedua sektor ini, *multiplier effect*-nya terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tinggi.

Faktor pemimpin

Faktor pemimpin menjadi kunci dalam revitalisasi pengelolaan belanja negara. Dorongan Presiden Jokowi untuk mempercepat proses lelang berbagai proyek infrastruktur adalah bukti kebuntuan masalah realisasi anggaran selama ini yang sangat "heavy" pada kuartal III dan IV dapat dipecahkan. Pada saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2), Presiden Jokowi kembali menunjukkan perhatiannya terhadap urusan anggaran. Presiden meminta semua menternya untuk mengendalikan

penuh anggaran yang diberikan negara. Presiden juga menginginkan penggunaan anggaran di kementerian fokus terhadap program prioritas.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan pertengahan bulan ini, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengungkapkan bahwa *incremental spending* memang masih menjadi tantangan dalam penganggaran di pusat dan daerah. Pola-pola lama berupa pengulangan proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul berulang setiap tahun. Oleh karena itu, Wamenkeu menggarisbawahi pentingnya *refocusing* dan pengurangan belanja yang tidak efisien di kementerian dan lembaga.

Pada pelaksanaan anggaran APBN sepanjang 2015, setidaknya tiga menteri yang menemukan ketidakefisienan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, misalnya, memangkas anggaran Rp 5,35 triliun untuk proyek-proyek yang mubazir dan sekitar Rp 2,05 triliun untuk penghematan lelang setelah dilakukan melalui *e-katalog*. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berhasil mengefisienkan kegiatan dinas luar kota hingga Rp 1,9 triliun dan berbagai kegiatan lain yang mencapai miliaran rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan sejumlah kegiatan yang mubazir hingga berhasil mengefisienkan anggaran Rp 1,5 triliun. Selain isu inefisiensi anggaran, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya kualitas belanja yang benar-benar dikawal. “Pola belanja di K/L harus benar-benar mendukung tupoksi,” kata Wamenkeu.

Optimalisasi TEPR

Untuk mewujudkan optimalisasi penyerapan anggaran, Presiden Jokowi sebenarnya telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Menteri Keuangan ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah dan Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua Tim Pelaksana. TEPRA dibentuk untuk melakukan pengawasan atas realisasi APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran berjalan. Di samping itu, TEPRA juga bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

Sebagai Ketua Tim Pelaksana TEPRA, Mardiasmo mengungkapkan bahwa pada tahun ini, TEPRA akan meningkatkan perannya. Ada beberapa strategi yang akan dijalankan TEPRA, antara lain memantau K/L



yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi fokus pemerintah, mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dan pemutakhiran realisasi belanja menggunakan sistem aplikasi seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi TEPR (Sismontep).

Di samping itu, TEPRA juga terus membuat analisis rutin tentang realisasi belanja negara dan penyusunan rencana aksi fasilitasi K/L dengan realisasi anggaran yang rendah. Salah satu tindakan nyata TEPRA adalah mendorong, mendampingi, memfasilitasi, dan memberikan informasi yang lengkap kepada K/L untuk dapat melakukan tender awal APBN 2016 sejak November tahun lalu. Proses ini telah dimulai tanpa menunggu terbitnya DIPA.

Salah satu kekhawatiran para pemimpin K/L dan kepala daerah terkait anggaran adalah permasalahan hukum dalam pengambilan keputusan. TEPRA turut meminimalisir persoalan ini. Melalui Kejaksaa sebagai Anggota TEPRA, dibentuk Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4P). Tim ini secara pro aktif melakukan upaya preventif dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah. Di samping itu juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat pusat.

Cerita sukses pemimpin daerah

Memberikan perhatian terhadap urusan

Atraksi air mancur menari di Taman Sri Baduga yang menjadi kebanggaan warga Purwakarta.

Foto Dwinanda Ardhi

anggaran bukan hanya dilakukan oleh pemimpin di pusat. Kisah keberhasilan mengelola anggaran juga datang dari daerah. Dua di antaranya adalah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Terobosan mengelola APBD langsung dilakukan Dedi Mulyadi pada awal masa kepemimpinannya. “Saya mempunyai prinsip, pemerintah yang baik itu bukan yang menyimpang uang berlama-lama di bank, tetapi fasilitas publiknya buruk,” ujar Dedi yang ditemui Media Keuangan di Kantor Bupati Purwakarta pertengahan bulan Februari.

Ketika awal menjabat, yang menjadi fokus utama Dedi bukan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta, melainkan mengelola belanja daerah dengan benar. “Kita membuat banyak pemasukan ke kas daerah, tetapi kalau dibelanjakan secara tidak tepat untuk apa?” katanya.

Sebagai pemimpin baru, Dedi turun langsung dan mengevaluasi

"Satu rupiah pun anggaran yang dialokasikan, harus jelas manfaatnya, baik dalam hal pemberian layanan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan"

Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng

secara rinci belanja pemerintah daerah selama ini. Setelah itu, dia mengurangi inefisiensi belanja barang, seperti belanja media dan komunikasi yang menurutnya terlampau mahal. Dedi mempunyai kesempatan untuk mengubah penyusunan APBD 2008. Dari situ, dia mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan melakukan “bedah” anggaran secara detail. “Kalau diperiksa satu-satu, komponen belanja itu, bisa sampai ratusan miliar (inefisiensi) anggarannya,” ujar Dedi.

Dedi berkomitmen untuk mengurangi inefisiensi itu dan mengalihkannya untuk membangun jalan, menyediakan sekolah gratis, membeli ambulans, memberikan jaminan kesejahteraan desa, hingga menyediakan listrik sampai ke daerah pelosok. “Waktu awal memimpin, banyak pegawai pemda yang tidak percaya dengan apa yang saya lakukan,” katanya.

Sebagai manusia, Dedi tak menampik adanya kekhawatiran menghadapi persoalan hukum dalam pengelolaan APBD. “Perasaan khawatir ada saja, tetapi kan kita harus melakukan (mengelola belanja) untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dedi. Yang dia selalu tegaskan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah pemeriksaan seluruh tahapan pelaksanaan anggaran. “Begitu muncul kekurangan pembayaran, saya instruksikan untuk cepat dilunasi,” ujar Dedi.

Saat ditanya kunci keberhasilan mengubah budaya kerja aparatur Kabupaten Purwakarta, Dedi mengungkapkan bahwa yang terpenting bukan pada hal-hal seremonial. “Jangan terlalu banyak memberikan ceramah atau rapat. Di Purwakarta tidak ada apel pagi,” katanya. Salah satu ukuran baiknya kinerja SKPD, lanjut Dedi

adalah pada keberhasilan penyerapan anggaran.

Tak kalah menarik dari cerita sukses di Purwakarta, keberhasilan pelaksanaan APBD di Bantaeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, juga memberikan inspirasi. Menurut Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran ada pada perencanaan. “Satu rupiah pun anggaran yang dialokasikan, harus jelas manfaatnya, baik dalam hal pemberian layanan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan,” kata Nurdin.

Sebagai pimpinan, Nurdin juga membuat sistem dan mendelegasikan wewenang kepada setiap SKPD dalam mengelola anggarannya. Semua program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan sudah dibahas sebelum tahun berganti. Dalam perencanaan anggaran, jajaran aparat hukum di daerah juga dilibatkan. “Jadi tidak ada kegiatan di Bantaeng yang tidak terlaksana karena bupati tidak ada di tempat atau keluar daerah,” ujarnya.

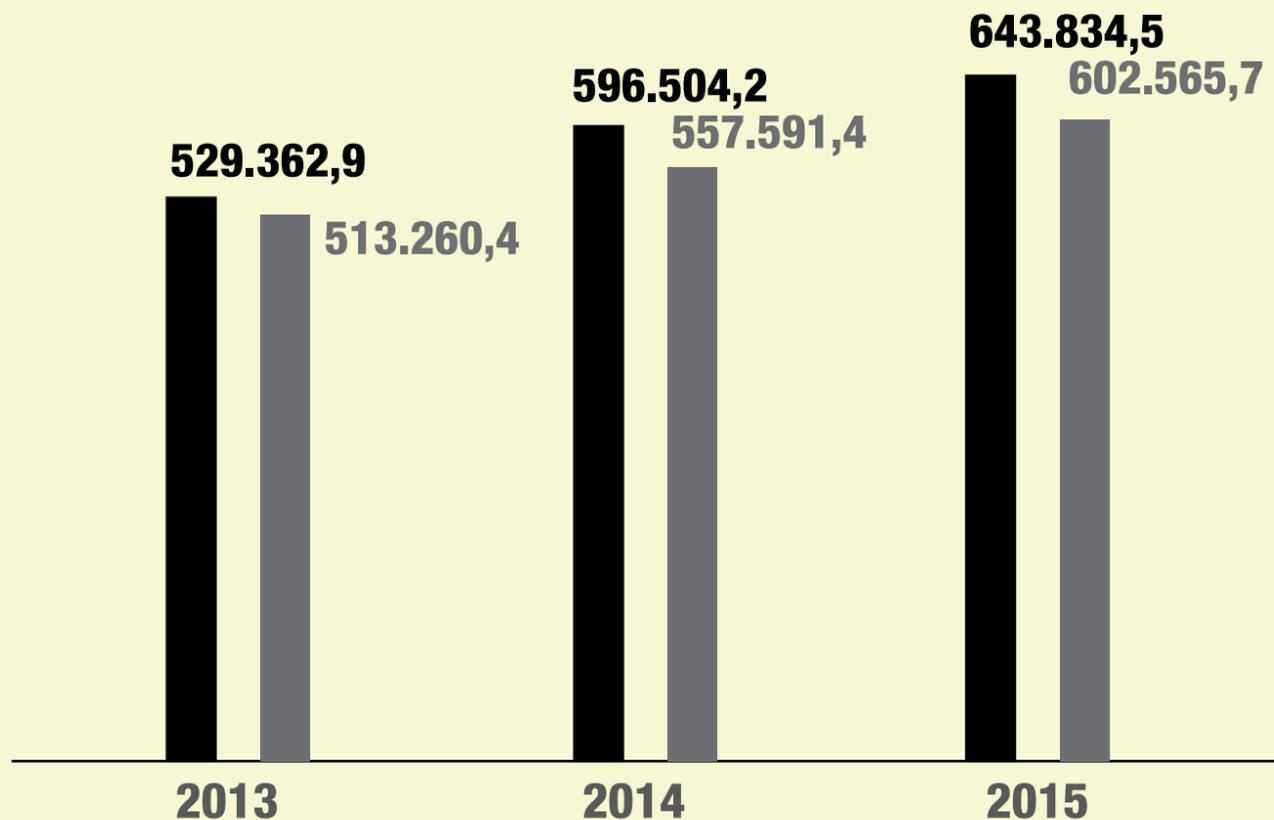
Yang menarik, di Bantaeng terdapat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. Implementasinya berupa keterlibatan masyarakat dalam bentuk Forum Delegasi dari masing-masing kecamatan. Mereka dilibatkan dalam menyusun perencanaan hingga proses penganggaran. Hasilnya, masyarakat merasa memiliki dan turut serta merawat hasil pembangunan yang ada.

Nurdin juga serius dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Bantaeng. “Satu desa itu bisa membuat sendiri RPJM dan RKP-nya,” kata Nurdin. Selanjutnya, jajaran pemerintah kabupaten akan membantu dalam sinergi program antardesa agar tidak tumpang tindih. “Aparatur dan masyarakat desa yang kreatif itu pasti percepatan pembangunannya bisa lebih baik,” lanjutnya.

Kepada jajaran di bawahnya, Nurdin selalu mendorong agar daya serap anggaran selalu baik, utamanya karena hal itu dapat menyerap banyak tenaga kerja. “Jangan sampai ada masyarakat Bantaeng yang menganggur terlalu panjang. Daripada dia harus mencari kerja ke tempat lain, lebih bagus ini kita luncurkan program-program pembangunan yang cepat,” kata Nurdin. Untuk melakukan *monitoring* dan memutakhirkan proses pelaksanaan anggaran, Nurdin memimpin diskusi yang dikemas dalam bentuk *coffe morning* setiap Senin. Kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran SKPD dan para pejabat struktural.

Teks Dwinanda Ardhi

perbandingan realisasi dan anggaran
Dana Transfer Daerah



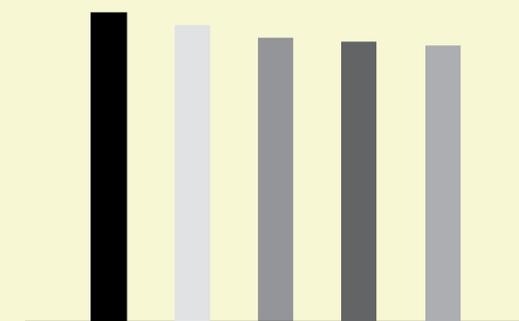
Perkembangan Dana Transfer ke Daerah

Penyerapan Dana Transfer Daerah
tertinggi tahun 2014



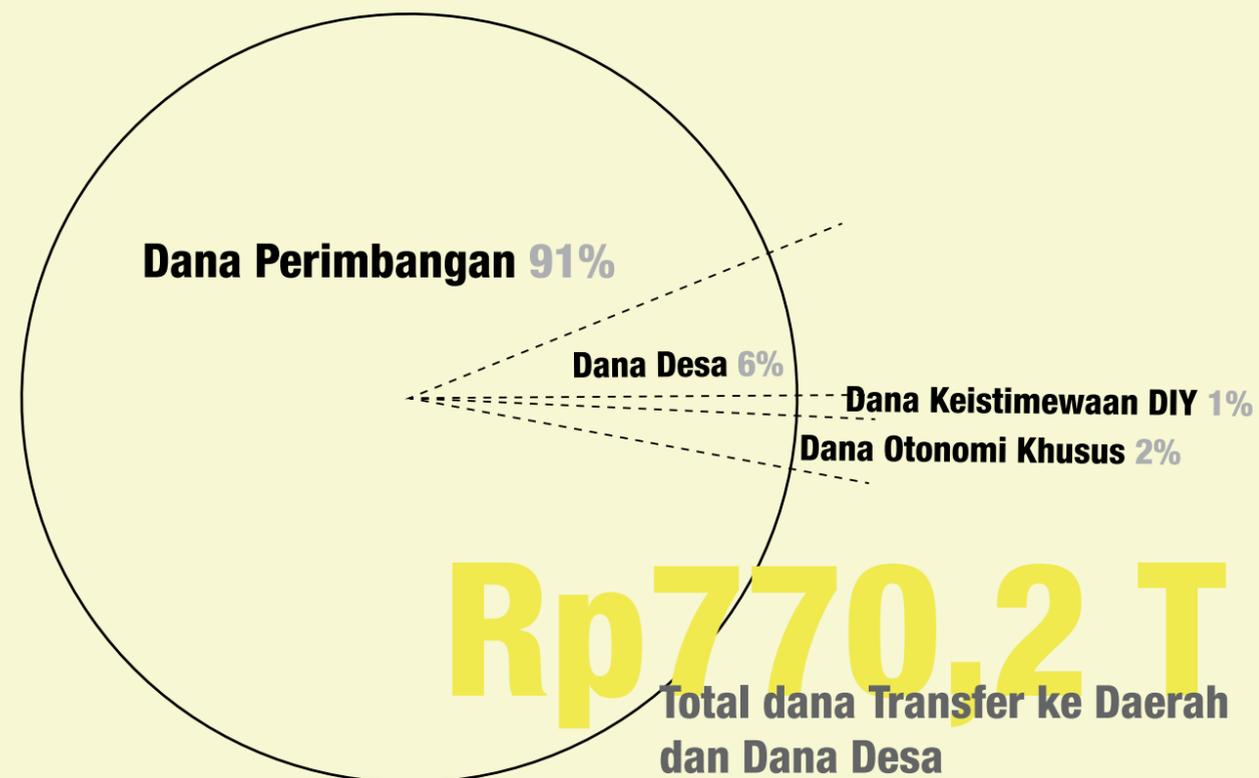
Jawa Timur
112,32%

Lima Provinsi dengan Persentase
Penyerapan Dana Transfer Daerah
tertinggi tahun 2014



1. Prov. Jawa Timur (112,32%)
2. Prov. Jawa Tengah (107,78%)
3. Prov. Lampung (103,15%)
4. Prov. Bengkulu (102,01%)
5. Prov. Kalimantan Tengah (100,52%)

Penyerapan Dana Transfer Daerah
tertinggi tahun 2014



Penyerapan Tepat Sasaran



Konsep membangun Indonesia dari pinggirannya mulai tercermin dari besarnya alokasi anggaran ke daerah yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, penyerapan anggaran masih harus terus ditingkatkan.

Proyek pembangunan MRT dibiayai oleh APBN, APBD, dan pinjaman asing.

Foto
Tino Adi P.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya memperkuat ekonomi daerah pada setiap program kerjanya. Ini dibuktikan dari total anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang semakin meningkat. Namun ternyata, ini belum diimbangi dengan penyerapan anggaran yang sempurna.

Tercatat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada APBNP 2015 mencapai Rp664,60 triliun atau meningkat dibanding APBNP 2014 sebesar Rp596,50 triliun. Dari angka tersebut, realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa per 31 Desember 2015 mencapai Rp623,33 miliar atau 93,79 persen dari target APBNP 2015. Meskipun demikian, sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan (dana menganggur) masih cukup besar, mencapai Rp99,7 triliun.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas APBN 2016 untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sejak akhir tahun lalu. Tujuannya agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih tepat waktu sehingga berbagai kegiatan dapat dimulai di awal tahun 2016.

Seiring dengan percepatan DIPA, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem pendukung SPAN. Salah satu fitur andalan SPAN ialah monitoring pelaksanaan anggaran secara *real time*, yang dapat dilihat oleh para Menteri bahkan Presiden.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto seperti dikutip dari *website* kemenkeu.go.id juga meminta agar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengintensifkan komunikasi dengan Satker. "Satker yang memiliki pagu anggaran yang besar agar dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan di tahun 2016," ujarnya.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan juga menyiapkan sejumlah kebijakan terkait transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). "Mulai tahun 2016, kami telah menyusun perubahan kebijakan TKDD secara revolusioner. Tidak hanya menyangkut masalah penyaluran, namun juga bagaimana melakukan pengalokasian TKDD secara tepat dan efisien guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.

Pertama, peningkatan alokasi anggaran TKDD dalam APBN 2016 yang mendekati belanja

Kementerian/Lembaga (K/L). Jika pada tahun 2015 selisih antara belanja K/L dengan TKDD Rp130,8 triliun maka pada tahun 2016 selisih hanya Rp13,9 triliun. Kedua, meningkatkan besaran dana alokasi umum (DAU) sebagai *equalization grant*. Tercatat, DAU tahun 2016 meningkat Rp32,6 triliun dibanding DAU tahun 2015.

Ketiga, memperkuat kebijakan dana alokasi khusus (DAK), seperti: 1) meningkatkan alokasi DAK tahun 2016 menjadi Rp208,9 triliun; 2) meniadakan kewajiban dana pendamping, percepatan penetapan juknis, perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Keempat, memperbaiki formulasi dana insentif daerah (DID) menjadi Rp5,0 triliun tahun 2016.

Kelima, meningkatkan alokasi dana desa hingga 6 persen dari dan di luar transfer ke daerah sesuai *road map* dana desa 2015-2019. Keenam, meningkatkan kualitas pengelolaan dana otonomi khusus melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas dana otsus Papua dan Papua Barat.

Selain sejumlah kebijakan pengalokasian di atas, dari sisi penyaluran untuk masing-masing TKDD dilakukan perubahan periode waktu, besaran dan persyaratan penyaluran. Salah satunya pada penyaluran DAK yang berbasis kinerja penyerapan. Selain itu, juga dilakukan perubahan pola penyaluran Dana Desa. Mulanya dana desa disalurkan dalam tiga tahap pada April (40%), Agustus (40%), dan Oktober (20%), lalu berubah menjadi dua tahap, yakni Maret (60%), dan Agustus (40%).

Selanjutnya, untuk mencegah timbulnya dana *idle*, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2015 tentang konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai. Tujuan pelaksanaan konversi yaitu mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, serta mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank pada jumlah yang wajar.

"Dengan adanya kebijakan konversi, diharapkan daerah dapat lebih disiplin dalam mengelola belanja di APBD. Diharapkan (juga) daerah akan lebih memacu penggunaan uang dalam APBD-nya, tidak termotivasi untuk menempatkan uangnya dalam bentuk deposito di perbankan, serta tidak lagi mengandalkan bunga deposito dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Boediarso.

Kemudian, untuk menjaga agar dana transfer tersebut tepat sasaran, Pemerintah memiliki kebijakan *men-drive* penggunaan beberapa jenis dana transfer (*earmarking*). Antara lain DAK dan sebagian Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang lebih dikenal dengan dana transfer khusus (*specific grant*). Sementara terkait dana desa, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Disamping sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah juga membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA). Pembentukan TEPRA merupakan kelanjutan dari Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Wakil Menteri Keuangan sekaligus ketua tim pelaksana TEPRA, Mardiasmo memaparkan bahwa TEPRA dapat menjadi alat untuk mempercepat penyerapan anggaran. Keberadaan TEPRA dapat memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

“TEPA itu yang bagus (pelaksananya) yang cepat menyerap (anggaran), secara implisit (hasilnya - pembangunan) tidak terlihat. Kalau TEPRA lebih banyak pada evaluasi dan pengawasan (kegiatan). Artinya tidak hanya cepat tetapi harus ada kualitasnya (tepat sasaran).

TEPRA tidak hanya ‘beroperasi’ di lingkungan pemerintah pusat, namun TEPRA akan juga dibentuk di pemerintahan daerah

(provinsi dan kabupaten/kota). Sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Hak rakyat

Sejalan dengan pemerintah, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan bahwa uang yang mengalir dari pusat ke daerah sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. “Inti dari otonomi daerah ialah kesejahteraan rakyat. Tantangannya kini bagaimana uang

“Mulai tahun 2016, kami telah menyusun perubahan kebijakan TKDD secara revolusioner. Tidak hanya menyangkut masalah penyaluran, namun juga bagaimana melakukan pengalokasian TKDD secara tepat dan efisien.”

Boediarso
Teguh Widodo
Direktur
Jenderal
Perimbangan
Keuangan

yang sudah ada di tangan daerah bisa dikelola secara akuntabel dan efektif,” ujarnya.

Dari total sekitar 508 kota/kabupaten dengan 34 provinsi, Robert melihat sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di daerah. Pertama, proporsi alokasi belanja birokrasi masih lebih tinggi dibandingkan belanja modal, maupun barang/jasa. Kedua, separuh dari total daerah di Indonesia masih mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang berarti kualitas pelaporan daerah belum sepenuhnya mencapai standar tata kelola keuangan yang baik.

Robert menyoroti regulasi yang berbeda antar instansi. Ketika pemerintah daerah menyusun APBD, aturan yang harus digunakan ialah aturan Kementerian Dalam Negeri. Lantas, saat pelaporan, pemerintah daerah harus menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP), seperti yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah kebijakan ini dinilai Robert tidak konsisten karena membingungkan pemerintah daerah sehingga Robert meminta pemerintah untuk menetapkan satu model yang dapat menjadi rujukan.

Permasalahan berikutnya ialah daya serap. Oleh karena itu, Robert menekankan sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, yaitu dengan memberikan kepastian hukum, dan jaminan perlindungan hukum. Disamping itu, pemerintah daerah juga seharusnya lebih memperhatikan masalah pembebasan lahan, dan perizinan usaha.

“Ingat bahwa uang bukan sekedar fiskal tapi hak rakyat.” Dalam perspektif hak rakyat, kata Robert, dana menganggur maupun sisa anggaran lebih ini berarti penyunatan hak publik dimana semestinya rakyat sudah dapat menikmati layanan publik maupun infrastruktur lain tetapi ditunda atau bahkan hilang akibat pemerintah daerah belum membelanjakan uang untuk pembiayaannya.

Disisi lain, lanjut Robert, isu penyerapan anggaran bukan lagi sekedar mengukur tingkat penyerapan tertinggi, melainkan juga kualitas belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta keterpenuhan layanan publik. “Jangan sampai daya serap tinggi tapi proporsinya habis untuk birokrasi dan korupsi. Uang habis bukan untuk rakyat. Saya kira otonomi ke depan yang menguat pada sisi desentralisasi ini harus diimbangi dengan manajemen fiskal kuat di tingkat daerah,” tutur Robert.

Teks lin Kurniati



Belanja Daerah Berkualitas, Masyarakat Sejahtera



Foto
Dok. Biro KLI

Belanja pemerintah idealnya dilaksanakan sesegera mungkin agar roda ekonomi dapat berputar. Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi yang dapat mempercepat penyerapan anggaran. Di tingkat daerah, terdapat beberapa contoh daerah yang layak diacungi jempol karena penyerapannya tidak hanya tinggi, namun juga berkualitas, seperti Purwakarta dan Bantaeng.

Belanja Purwakarta sangat maksimal ya, kita belanjanya kelebihan. Sekarang malah minus Rp83 miliar”, ungkap Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta saat ditemui di kantornya. Baginya, pemerintah yang baik bukanlah yang menyimpan uang berlama-lama di bank tetapi fasilitas dan layanan publiknya buruk. Sebab itu, pemerintah kabupaten Purwakarta memilih untuk fokus merombak tata kelola keuangan secara mendasar agar dapat digunakan memenuhi kebutuhan publik.

Diceritakan Dedi, alih-alih memikirkan cara meningkatkan pendapatan, sejak awal ia lebih

memilih mengurus ketepatan belanja. Saat punya kesempatan untuk merubah penyusunan anggaran pada 2008, Dedi bersama seluruh jajaran menelusuri secara rinci komponen isi dan angka pada APBD. Dari sana, anggaran yang bisa dihemat sekitar Rp150 miliar untuk kemudian digunakan membangun infrastruktur prioritas.

Agar penyerapan anggaran bisa segera dilakukan, sejak awal tahun Purwakarta sudah menjalankan anggaran hibah, khususnya untuk memperbaiki infrastruktur desa. Hal ini memungkinkan dilakukan sebab hibah tidak membutuhkan waktu lelang. Biasanya pelaksanaan anggaran hibah akan berakhir di bulan April dimana pekerjaan fisik yang dilakukan secara lelang sudah bisa mulai dilaksanakan. “Yang penting bagi saya, uang ini segera berputar,” ujar Dedi.

Dijelaskan Dedi lebih lanjut, saat melakukan penyusunan sistem pendapatan, sisa anggaran yang diperoleh dari sisa lelang langsung dimasukkan kembali ke dalam pos pendapatan. Dengan begitu, tidak akan ada uang yang bocor karena dapat langsung diserap lagi untuk belanja pemerintah atau hibah akhir tahun ke desa. “Cara ini cukup efektif, sehingga rakyat Purwakarta kerja dari Januari hingga Desember,” tukasnya.

Strategi lain yang dilakukan adalah mendahulukan belanja yang melibatkan pihak ketiga, sementara belanja internal birokrasi dilambatkan. “Dari situ, uang kita bisa utuh dan bisa lebih menguatkan belanja publik,” kata Dedi.

Setiap Rupiah Belanja Bantaeng Harus Bermanfaat

Memotong jalur birokrasi menjadi cara lain yang dilakukan

Nuridin Abdullah, Bupati Bantaeng agar pelaksanaan anggaran lebih efektif. Menurutnya, pemerintahan seharusnya dibangun dengan sistem sehingga tidak bergantung pada pimpinan. Tidak semua hal harus ditangani Bupati. Kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan dilimpahkan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga meskipun Bupati sedang tidak di tempat semua kegiatan bisa tetap berjalan. “Prinsip saya, satuan kerja yang menggunakan anggarannya yang harus bertanggung jawab. Orientasinya bukan hanya proses tapi juga hasil,” kata Nuridin.

Selain itu, perencanaan pembangunan sudah dirampungkan secara matang dari jauh-jauh hari. Program yang akan dijalankan di tahun ini bukan hanya sudah dihimpun dari tahun sebelumnya, namun juga sudah disinergikan dengan pihak-pihak yang akan mengawasinya seperti kepolisian, kejaksaan, serta inspektorat daerah. Hal ini dilakukan agar percepatan belanja terhindar dari masalah hukum. “Kekhawatiran pasti ada. Namun semua diawali niat baik bahwa satu Rupiah pun dari APBD mesti dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga mendahulukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan publik. Program prioritas Bantaeng adalah membangun infrastruktur pertanian, mengingat 74 persen penduduk menggantungkan hidup di sektor ini. Sebab itu, belanja yang dapat menopang produksi pertanian seperti pengadaan benih, pupuk, dan ketersediaan air selalu disesuaikan dengan musim tanam.

Pembangunan kawasan wisata khususnya wisata agro, pantai, dan kuliner turut diutamakan mengingat potensinya cukup besar dalam menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD). Mulai dari infrastuktur jalan hingga layanan publik seperti akses layanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya disediakan secara gratis. “Tingkat kenyamanan yang ada saat ini membuat pengunjung yang datang ke Banteng semakin membludak” ucap Nuridin bangga.

Hal lain yang tak kalah penting kata Nuridin adalah melakukan efisiensi belanja rutin. “Setiap tahun kita lakukan *stock opname*. Dari situ kelihatan sebenarnya banyak barang kebutuhan kita yang bisa ditekan sehingga penghematannya bisa signifikan,” tutup Nuridin.

Teks Irma Kesuma

Demi Eksekusi Belanja Merata

Tahun 2016 menjadi tombak percepatan penyerapan anggaran. Tak ada lagi alasan untuk bekerja santai di awal tahun. Semua demi kesejahteraan rakyat yang merata.



Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Foto Aditya Arifiyanta

Kurang maksimalnya realisasi penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah mendesak Presiden untuk membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Dasar pembentukan TEPRA tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. Simak perbincangan Media Keuangan dengan Ketua Pelaksana TEPRA, Mardiasmo, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Apa sebenarnya persoalan penyerapan anggaran sehingga Presiden mendesak untuk membentuk TEPRA?

Hal ini berkaca dari data perkembangan realisasi Belanja Negara dan Belanja Daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kondisi realisasi anggaran belanja cenderung rendah, pola distribusinya cenderung menumpuk pada triwulan akhir. Dampaknya, nilai sekarang (*present value*) menjadi turun dari anggaran sehingga *output*-nya cenderung lebih rendah.

Presiden beberapa kali menyampaikan di depan seluruh Menteri Kabinet Kerja bahwa anggaran harus segera disampaikan ke masyarakat. Beliau tidak mau kalau tiga atau empat bulan pertama hanya *berleha-leha*, tapi di triwulan terakhir penyerapan *malah* meroket. Kondisi ini masih terjadi tahun lalu. Penyerapan semester I tahun 2015 sekitar 32 persen, lalu akhir tahun mencapai sekitar 85,86 persen. Jadi harus ada perubahan yang fundamental. Tahun 2016 ini adalah tahun kerja dan tahun percepatan.

Atas dasar itu, pemerintah perlu membentuk



Pengadaan dan lelang belanja yang strategis dipercepat, sehingga saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) keluar sudah bisa langsung tanda tangan kontrak.

Mardiasmo
Wakil
Menteri
Keuangan

TEPRA dalam rangka pengawasan atas realisasi anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun berjalan. Selain itu, TEPRA dibentuk demi evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang ditetapkan dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keinginan Presiden ini memberikan tantangan tersendiri untuk TEPRA. Kami ingin yang terbaik untuk Indonesia.

Sampai saat ini bagaimana proses percepatan anggaran yang telah diterapkan K/L?

Tahun 2016 para menteri sudah berkali-kali diingatkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, lebih tepatnya mempercepat belanja infrastruktur. Pengadaan dan lelang belanja yang strategis dipercepat, sehingga saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) keluar sudah bisa langsung tanda tangan kontrak. *Alhamdulillah* disambut oleh banyak kementerian. Saya dengar Menteri Pertanian yang paling awal lalu disusul dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian Menteri Perhubungan. Semuanya jadi berlomba-lomba demi kebaikan, demi mempercepat pekerjaan.

Sejauh ini, langkah-langkah apa saja yang diambil TEPRA dalam menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran?

Pertama, kami memantau kementerian/lembaga (K/L) yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi fokus pemerintah pada anggaran belanja K/L. Kedua, mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Ketiga, kegiatan rutinnya melalui pemutakhiran realisasi belanja pemerintah berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi TEPRA (SISMONTEP), serta analisis rutin tentang realisasi belanja negara dan penyusunan rencana aksi fasilitasi K/L dengan realisasi rendah. Keempat, fasilitasi percepatan realisasi APBN. Kelima, merumuskan kegiatan *debottlenecking* K/L dalam realisasi anggaran.

Bagaimana TEPRA membantu daerah dalam menyerap anggaran? Mengingat ada kekhawatiran para kepala daerah tersandung kasus korupsi dalam penyerapan anggaran.

Kejaksaaan, sebagai anggota TEPRA, membentuk Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4P) dalam rangka merespon lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan arahan Presiden. TP4P ini bertugas untuk mengawal keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif di tingkat pusat. Salah contohnya dengan memberikan penerangan hukum serta diskusi di lingkungan instansi pemerinth, BUMN, dan BUMD terkait lelang dan pelaksanaan pekerjaan. TP4P juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal hingga akhir.

Menurut Anda, selama ini apa hambatan K/L dalam menyerap anggaran secara cepat, cermat, dan efisien?

Selama ini, salah satunya yang menghambat itu adalah DNA (deoxyribonucleic acid) birokrasi. DNA diartikan karakter. Artinya, karakter birokrasi kita saat ini kental dengan sifat tidak mau berubah, tidak mau keluar dari *comfort zone*, tidak mau kompetitif, tidak mau diberi tantangan baru, dan tidak ada inovasi baru.

Ada juga penyakit-penyakit pegawai yang bertujuan untuk menaikkan *take home pay*. Contohnya seperti melakukan perjalanan dinas yang tidak perlu, konsinyering yang seharusnya bisa saja rapatnya dilakukan di kantor, ada juga dengan cara membentuk program kegiatan dengan tim-tim yang *output*-nya tidak kelihatan. Belanja barang yang tidak tepat sasaran inilah yang menjadi sumber pemborosan K/L. Selain itu, seluruh K/L seharusnya melakukan budget meeting committee, membahas seluruh rincian penggunaan anggaran. Harus dipangkas mana saja yang tidak perlu. Tahun 2016 ini adalah tahun efisiensi. Saya senang semangat reformasi birokrasi semakin terus digalakkan.

Teks Pradany Hayyu

Bangun Optimisme Perekonomian 2016

Foto
Dok. Biro KLI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar acara *Stakeholders Gathering: Optimisme Perekonomian 2016* di Aula Dhannapala, Jakarta, Kamis (4/2) malam. Acara yang bertajuk *Stakeholders Gathering: Optimisme Perekonomian 2016* ini merupakan salah satu sarana komunikasi dan penyebaran informasi semi formal antara Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan terkait *outlook* perekonomian tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini dimaksudkan agar semua pihak secara dini mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi. Mengambil momentum di awal tahun 2016, acara yang dihadiri sekitar 300 undangan ini disiapkan agar Kemenkeu bersama para *stakeholders* dapat mewaspadai segala kompleksitas dan kecepatan perubahan baik global maupun domestik.

“Dari interaksi tersebut, masing-masing pihak diharapkan dapat memiliki pemahaman yang proporsional terhadap kondisi perekonomian Indonesia.



(Sehingga) Mampu bersinergi memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan,” ungkap Hadiyanto.

Pada kesempatan ini, Kemenkeu juga melakukan peluncuran aplikasi iOS dan android *e-magazine* Media Keuangan, yang pada Januari 2016 lalu telah menerbitkan edisi ke-100. Hingga saat ini, sekitar 10.000 eksemplar majalah yang merupakan media komunikasi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi ini telah tersebar ke berbagai *stakeholders* internal dan eksternal Kementerian Keuangan setiap bulannya.

“Kami ingin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada para *stakeholders* yang telah memberikan kontribusi dan menjadi mitra pengguna Media Keuangan. Selanjutnya, tentu kami juga menyadari ada banyak keterbatasan yang harus dilengkapi sehingga untuk ke depannya, Media Keuangan baik dalam bentuk *hard copy* maupun aplikasinya dapat menjangkau pengguna yang lebih luas dan memuat konten yang semakin berkualitas,” jelasnya.

Perbaikan secara terus-menerus atas konten dan tampilan Media

Keuangan tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu yang berfokus kepada empat hal. Pertama, perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan. Kedua, penataan organisasi yang *fit for purpose*. Ketiga, peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia. Keempat, peningkatan sistem tata kelola serta layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan Kemenkeu baik dari *stakeholders* internal maupun *stakeholders* eksternal Kemenkeu. Diantaranya terdiri atas mitra kerja Kemenkeu dari sejumlah Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, pimpinan Badan Usaha Milik Negara. Acara ini juga turut dihadiri oleh pimpinan perusahaan nasional dan multinasional, para akademisi, para pengamat ekonomi, dan para pemimpin media cetak dan elektronik nasional dan internasional.

Teks Novita Asri H.

Pemerintah Resmi Tawarkan Sukuk Ritel Seri SR-008

Foto
Dok. Biro KLI

Pemerintah secara resmi meluncurkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-008 di Aula Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/02). Peluncuran ini menjadi wujud keseriusan dan komitmen pemerintah dalam pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Masa penawaran SR-008 ini sendiri baru dibuka pada Jumat, 19 Februari hingga 4 Maret 2016 mendatang.

Di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat dalam tiga dekade terakhir. Salah satu prestasi dapat dilihat melalui nilai penerbitan sukuk yang mengalami peningkatan signifikan. Pada 2008, Pemerintah hanya menerbitkan Sukuk Negara sebesar Rp4,7 triliun, sementara pada 2015 nilai sukuk yang diterbitkan mencapai Rp118,51 triliun.



Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, dengan adanya instrumen investasi ini, masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam mendukung pembiayaan nasional. "Kita ingin kalau negara berutang, berutang ke warga negaranya sendiri. Kalau Anda membeli Sukuk, anda langsung berpartisipasi dalam pembangunan negara," kata Menkeu.

Sukuk ritel dapat dikatakan sebagai jembatan bagi masyarakat Indonesia yang merupakan basis investor besar, namun masih kurang yakin untuk berinvestasi selain tabungan. Selain itu, sukuk ritel memiliki keunggulan sendiri karena dijamin oleh negara sehingga memberikan rasa aman untuk berinvestasi, serta ditawarkan untuk individu Warga Negara Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama,

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menyebutkan bahwa sukuk akan menjadi instrumen pembiayaan APBN. Namun, penerbitannya juga bertujuan untuk diversifikasi investor dan mendukung perkembangan pasar keuangan syariah.

Sebagaimana penerbitan Sukuk Negara Ritel seri-seri sebelumnya, SR-008 akan menasar bidang pendidikan dengan tema penerbitan "Mengirimkan Guru Terbaik ke Seluruh Pelosok Negeri". Tahun ini, sebagian fee penerbitan akan diterima oleh Yayasan Indonesia Mengajar dengan total donasi sebesar Rp750 juta, untuk program peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik yang berada di daerah terpencil.

Teks Amelia Safitri

Foto
Arfindo Briyan



SMF Percepat Pembangunan Perumahan Rakyat

Papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sudah seharusnya pemerintah menjamin rakyat untuk dapat memenuhi haknya akan tempat tinggal. Meski setiap tahun permintaan akan hunian yang layak terus bertambah, namun kenyataannya Indonesia masih mengalami kelangkaan pasokan rumah. Untuk itulah saat ini Presiden Joko Widodo mencanangkan program sejuta rumah.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) biasanya bisa menjadi solusi bagi yang ingin memiliki rumah idaman. Hanya saja, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah serius, salah satunya kendala pembiayaan. Penyalur KPR dituntut menyediakan dana yang tidak sedikit. Selain dari dana pihak ketiga dan pasar modal, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan membentuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang mengemban misi membantu pembiayaan sekunder perumahan. Seperti apa kiprah SMF untuk mendukung kepemilikan rumah keluarga Indonesia? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Utama SMF, Raharjo Adisusanto di kantornya.

Bagaimana peran SMF dalam penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat?

Secara sederhana, tugas SMF adalah menyalurkan dana jangka panjang kepada penyalur KPR. Saat ini mayoritas penyalur KPR adalah perbankan, meskipun tidak spesifik harus perbankan. Sumber dana kami adalah dari pasar modal. Misi utama SMF adalah untuk meningkatkan pertumbuhan KPR.

Selain itu, SMF bertugas mengatasi masalah perbedaan jatuh tempo (*maturity mismatch*). Kredit KPR itu kan jangka panjang, sedangkan dana utama perbankan yang umumnya berasal dari tabungan, deposito dan giro adalah jangka pendek. Dana tersebut bisa ditarik setiap saat. Ketidaksesuaian waktu jatuh tempo ini menimbulkan resiko likuiditas.

Kesenjangan waktu jatuh tempo juga menimbulkan resiko perubahan tingkat suku bunga. Saat bunga dana simpanan naik, maka bunga kredit juga naik (*floating rate*). Namun idealnya, KPR menggunakan bunga tetap (*fixed rate*), terutama bila menyasar masyarakat menengah bawah. Jika menggunakan *floating rate*, saat bunganya naik bisa jadi debitur tidak bisa bayar *dong*. Masyarakat perlu keterjangkauan baik dari sisi uang muka maupun angsuran.

Siapa saja yang saat ini menggunakan jasa SMF?

Saat ini ada 18 institusi yang meminjam ke SMF, terdiri dari 15 perbankan dan 3 perusahaan pembiayaan (*multi*



finance). Untuk perbankan, yang paling banyak adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), namun *customer* terbesar kami adalah Bank Tabungan Nasional (BTN). Akhir tahun lalu ada 4 BPD lagi yang sudah melakukan Nota Kesepahaman dengan kami. Diharapkan tahun ini mereka resmi menjadi debitur SMF.

Kerjasama dengan perusahaan pembiayaan juga perlu dikembangkan terutama untuk menyentuh masyarakat yang memiliki penghasilan non formal. Umumnya perbankan hanya berani menyalurkan dana pada mereka yang berpenghasilan tetap. Padahal di sektor informal pasarnya juga cukup besar. Jika pendekatan dan analisisnya benar, sebenarnya banyak dari mereka yang cukup layak mendapat pendanaan.

Contohnya, ada seorang mandor yang merupakan pegawai kontrak. Perbankan tidak berani memberinya KPR karena dianggap bisa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 800 ribu unit rumah baru. Oleh sebab itulah pemerintah meluncurkan program satu juta rumah agar *supply* rumah dapat terpenuhi.

Raharjo
Adisusanto
Direktur
Utama
PT SMF

kapannya saja. Padahal mungkin saja dia merupakan pegawai inti yang dianggap paling ahli di bidangnya, sehingga resiko tidak mampu membayar lebih rendah. Contoh lain misalnya pedagang mie godok atau toko *photocopy* yang usahanya sudah berjalan lebih dari tiga tahun dan memiliki kemampuan keuangan. Kami berharap semakin banyak penyalur KPR yang meminjam dana ke SMF. Dengan begitu aksesibilitas masyarakat terhadap KPR semakin luas.

Apa saja produk dan jasa yang ditawarkan?

Kami memiliki tiga program untuk membantu klien yaitu sekuritisasi, pembiayaan, serta program pendukung. Sekuritisasi adalah mengubah tagihan KPR menjadi Efek Beragun Aset (EBA) di pasar modal. Proses dimulai melalui penjualan hak tagih penyalur KPR kepada SMF. Kumpulan tagihan-tagihan tersebut kemudian ditransformasi menjadi EBA. Dengan begitu, penyalur KPR dapat memperoleh likuiditasnya kembali tanpa harus menunggu KPR dilunasi.

EBA merupakan alternatif investasi yang menarik dan aman. Selain memiliki *rating* AAA (yang berarti baik, layak dan stabil), EBA KPR juga dijamin oleh SMF sebagai penerbit. Dana dari penjualan EBA tersebut kemudian dikembalikan ke penyalur KPR untuk digunakan oleh masyarakat dalam bentuk KPR.

SMF juga memberikan pembiayaan kepada penyalur KPR dengan jaminan hak tagih KPR. Tujuannya adalah agar pasar primer perumahan menjadi lebih kuat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan volume KPR yang berkesinambungan. Program ini bisa menjadi pilihan bagi penyalur KPR yang belum siap melakukan sekuritisasi.

Selain itu, SMF menerbitkan surat utang, baik dalam bentuk obligasi

maupun surat utang lainnya sebagai sumber pendanaan dalam pemberian pembiayaan ke penyalur KPR. Surat utang tersebut juga dapat menjadi pilihan investasi dengan imbal hasil menarik dan aman dengan *rating* AA+.

Hal lain yang tak kalah penting, kami menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi para personel penyalur KPR. Selain sebagai sarana edukasi tentang pembiayaan sekunder perumahan, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka akan operasionalisasi KPR yang terstandar.

Bagaimana kinerja SMF beberapa tahun terakhir? Berapa besar dana yang berhasil disalurkan?

Kalau kita lihat pertumbuhan SMF yang diukur oleh pemegang saham, tingkat akumulasi pertumbuhan kita selama empat tahun terakhir rata-rata 43,74 persen, jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan sebesar 15 persen. Hal ini bisa disebut prestasi, apalagi di tengah perlambatan ekonomi seperti tahun lalu.

Secara total, SMF telah mengucurkan Rp20,25 triliun hingga Desember 2015, atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp16,54 triliun. Aliran dana jangka panjang paling besar diberikan kepada penyalur pinjaman sebesar Rp14,5 triliun dan sekuritisasi 5,6 triliun. Dengan demikian total penyaluran kepada penyalur KPR dibandingkan modal disetor mencapai 6,75 kali.

Seperti apa perkiraan pertumbuhan properti tahun ini? Bagaimana dampaknya bagi SMF?

Jika melihat pertumbuhan penduduk dan masih banyaknya kekurangan (*backlog*) perumahan, diperkirakan sektor properti masih

akan tumbuh signifikan. Selain itu, adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan mendorong investasi asing langsung dan menambah kebutuhan akan hunian. Apalagi Indonesia saat ini dinilai sebagai negara tujuan investasi yang menguntungkan dengan potensi yang sangat besar.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini masih ada kekurangan rumah sekitar 13 Juta unit. Kalau dihitung, setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 800 ribu unit rumah baru. Oleh sebab itulah pemerintah meluncurkan program satu juta rumah agar *supply* rumah dapat terpenuhi.

Berapa banyak dana yang dibutuhkan?

Diperkirakan kebutuhan dana pembiayaan rumah setidaknya Rp200 triliun per tahun. Dari mana dana itu? Pertama dari perbankan. Tahun lalu jumlah pertumbuhan KPR sekitar Rp30 triliun. Kemudian ada dana subsidi perumahan sebesar Rp 9,3 triliun dan subsidi selisih bunga Rp2,1 triliun. Masih ada sisa kebutuhan dana sebesar Rp159 triliun. Dari mana mencari dananya? Ya dari pasar modal.

Apa rencana bisnis dan target SMF ke depan?

Untuk 2016 kami akan berupaya agar peyaluran pinjaman kepada perbankan baik perbankan konvensional, daerah, maupun syariah bisa meningkat lagi khususnya melalui pasar modal. Tahun ini kami menargetkan total aliran dana sebesar Rp 6,1 triliun. Sekitar Rp 4,1 triliun untuk penyaluran pinjaman dan sisanya sebesar Rp2 triliun untuk sekuritisasi. Sementara itu, untuk penerbitan surat utang diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun.

Teks Irma Kesuma

Inovasi Mengubah Keterbatasan Jadi Prestasi

KPP Pratama Makassar Barat

Makassar dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan sejak zaman prakolonial. Di kota inilah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat berlokasi, tepatnya di Jalan Balaikota Nomor 15. Wilayah kerjanya meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate, hingga Ujung Pandang. Dengan wilayah kerjanya tersebut, domain pajaknya terdiri dari kawasan wisata, perdagangan, perkantoran, dan pemukiman.

Selain letak kantor yang strategis, KPP ini juga dekat dengan sejumlah ikon wisata khas Makassar, mulai dari Benteng Rotterdam, pantai Losari, Karebosi, hingga Monumen Mandala. Boleh jadi, lingkungan yang bersahabat inilah yang melahirkan kreativitas tak habis-habis dari para pegawai di lingkungan kerja KPP Pratama Makassar Barat.

Di bawah kepemimpinan Ashri, kantor ini mendulang prestasi lewat beragam inovasi. Semangat untuk melayani, menurut pria kelahiran Buntu Lamba, Enrekang, Sulawesi Selatan ini, justru jadi modal awal untuk mengubah keterbatasan jadi prestasi. "Kuncinya pelayanan. Sekecil apapun, mulai dari satpam, *cleaning service*, hingga pimpinan, jiwanya harus melayani," jelas Ashri.

Capaian dan Prestasi

Ditemui Media Keuangan, Ashri yang mulai menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Makassar Barat sejak awal 2012 berbagi kisah tentang kondisi awal kantor hingga bagaimana mendorong semangat inovasi. Setelah beberapa tahun sebelumnya berhasil meraih juara sebagai kantor pelayanan percontohan (KPPc) terbaik di tingkat Kanwil DJP Sultanbatara, maka pada 2015 lalu, kantor ini berhasil meraih dua capaian sekaligus. Terbaik pertama KPPc tingkat Kementerian Keuangan dan posisi tiga terbaik mewakili Kementerian Keuangan untuk kategori inovasi dan pelayanan publik. Ashri mengaku semua pihak turut bersinergi dengan baik. "Dukungan penuh juga kami dapatkan dari tim Kanwil DJP Sultanbatara," kata Ashri.

Bersama Tim Kreatif

KPP Pratama Makassar Barat pertama kali didirikan pada 6 Mei 2008 dengan menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. "Ini dulu bangunan tua, lalu kami perbaiki secara keseluruhan," jelas Ashri.

Keterbatasan sarana prasarana adalah kondisi yang disadari Ashri perlu dibenahi. Inilah awal mula dibentuknya tim kreatif. Tim ini pula yang nantinya memberi banyak masukan, ide, juga terobosan bagi banyak perubahan positif di KPP Pratama Makassar Barat. "Kita ambil dari pegawai yang kreatif. Kita minta mereka untuk menuangkan konsep dan ide untuk jadi masukan bagi perbaikan kantor" kata Ashri. Selanjutnya, ide tersebut diarahkan dan diwujudkan bersama.

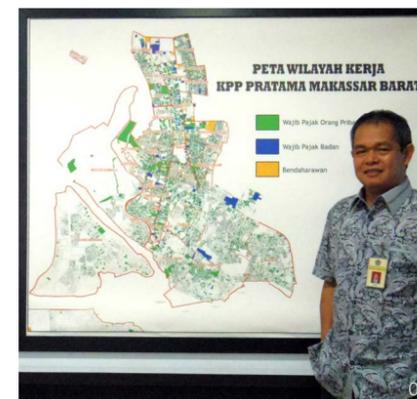
Saat memasuki tempat pelayanan, misalnya, para wajib pajak (WP) disugahi layanan yang memadai. Mulai dari akses jalan bagi penyandang cacat, kartu tamu, *business center*, *charging corner*, kantin kejujuran, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi sofa dan *wifi* gratis. Tak hanya itu, sejumlah inovasi unggulan juga dikembangkan, mulai dari aplikasi penggali potensi perpajakan atau Matappa, layanan *drive thru*, tampilan TPT tematik, manajemen arsip dengan sistem kode, hingga media saran dan kritik, serta media informasi.

Memetakan dan Memotret Potensi

Salah satu terobosan unggulan KPP Pratama Makassar Barat adalah pemetaan potensi perpajakan. *Mapping Tax Payer Profile Application* atau yang biasa disebut Matappa adalah aplikasi yang memuat peta blok sebagai petunjuk potensi pajak di masing-masing wilayah. Sebelum aplikasi ini mulai dikembangkan, para *account representative* (AR) biasa melakukan penyisiran ke tiap wilayah untuk menemukan potensi pajak.

"Berhubung ada pegawai kami yang jago IT (information teknologi), dibuatlah aplikasi ini," jelas Ashri. Setelah dilakukan pemetaan, data hasil rekam ini kemudian dimasukkan dalam aplikasi dan dapat terus diperbarui. Hal ini mempermudah para AR baru untuk mengenali wilayah kerja sekaligus potensi pajaknya. Pada perkembangannya terdapat pula sistem peringatan dini berupa notifikasi yang akan diterima AR dalam bentuk pesan singkat terkait pekerjaan yang memiliki tenggat waktu dan harus diselesaikan segera.

Selanjutnya dengan aplikasi ini, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang saat ke kantor pelayanan. Matappa memberi kemudahan bagi para WP untuk memantau kepadatan antrean pada loket TPT secara *real time* lewat ponsel mereka. "Cukup kirim SMS, WP bisa tahu jumlah antrean hari ini dan sudah berapa yang dipanggil", jelas Ashri. Selain itu informasi terkait dokumen yang telah selesai diproses dan lokasi pengambilan juga disampaikan kepada WP melalui pesan singkat tersebut.



"Sekecil apapun, mulai dari satpam, *cleaning service*, hingga pimpinan, jiwanya harus melayani."

Ashri
Kepala KPP
Pratama
Makassar Barat

TPT Tematik.

Foto
Dok. KPP
Pratama
Makassar Barat

Ashri, Kepala
KPP Pratama
Makassar Barat.

Foto
Wardah Adina

Dilayani Meski dalam Mobil

Bermula dari keterbatasan lahan parkir yang dimiliki tercipta ide layanan *drive thru*. Mengambil konsep restoran cepat saji, layanan ini berhasil mengefisienkan waktu para WP. "Jadi cukup di atas mobil atau motor, WP bisa dilayani bila ingin menyampaikan surat pajak ataupun mengambil dokumen pajak dari SMS yang sebelumnya kami kirimkan," jelas Ashri.

Efek berganda setelah diterapkannya kedua aplikasi tersebut adalah berkurangnya tingkat kepadatan tempat layanan terpadu. Tak hanya itu, penumpukan dokumen hingga risiko kehilangan berkas juga berhasil diminimalisasi. Bahkan tingkat kepuasan para WP ikut menanjak, seiring dengan pelayanan terbaik yang mereka terima.

Penataan Berkas Wajib Pajak

Berkas yang menumpuk dan sulit dicari adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai kantor pelayanan pajak. Meski masih sederhana, tetapi sistem penataan berkas mulai dibangun di KPP Pratama Makassar Barat. Caranya dengan mengklasifikasikan berkas lalu menempatkannya pada kardus yang

dilengkapi dengan *barcode*. Selanjutnya saat dibutuhkan, petugas cukup mengetikkan NPWP atau nama WP yang dimaksud, maka akan muncul lokasi berkas disimpan. Dengan demikian, mobilisasi arus berkas dapat diawasi dengan baik.

Bangun Sumber Daya, Lanjutkan Inovasi

Inovasi yang dilakukan bukan hanya terbatas pada fisik kantor, melainkan juga sumber daya manusia. Setiap pagi misalnya, sebelum memulai pekerjaan dilakukan doa bersama seluruh pegawai. "Namanya manusia perlu diingatkan setiap hari," jelas Ashri. Terdapat pula program *hadist of the day*, pengajian rutin, pembinaan olah raga, bakat dan seni, lomba kebersihan *employee of the month*, hingga bakti sosial. Melalui kegiatan tersebut budaya organisasi ditumbuhkan.

Saat ditanya tentang harapan, Ashri mengaku masih banyak ide-ide dari pegawai yang belum diwujudkan. Meski demikian, ia berharap semangat untuk berinovasi ini akan terus berlanjut dan tetap ada. "Siapapun pemimpinnya," tutup Ashri.

Teks Farida Rosadi

Hidup dengan Perjuangan

Hidup berkecukupan tak lantas berpangku tangan. Djoko buktikan hidupnya penuh perjuangan dan pengorbanan meraih kesuksesan.

Foto
Dok. Kanwil
DJPBn Jawa
Barat



Remaja lelaki itu terlihat biasa merumput (turun) ke sawah kala masa panen tiba di Delanggu, Boyolali. Tak canggung, ia mengangkut padi-padi yang telah menguning ke sebuah mesin penggilingan padi. Selesai digiling menjadi butiran beras, ia pun bergegas menggotong karung-karung beras ke rumahnya sebelum dibawa ke pasar untuk dijual keesokan harinya. Ialah Djoko Wihantoro, seorang anak lurah desa Manjung, kecamatan Sawit, yang telah menjabat sejak zaman Belanda.

Meskipun pria kelahiran 23 Maret 1956 ini merupakan seorang anak perangkat desa, tapi keadaan berkecukupan justru tak membuatnya berpangku tangan. Sebaliknya, anak pasangan Soenardi dan Soegiyem ini selalu berjuang dalam kehidupan. “Ayah saya sangat disiplin mengajarkan anaknya belajar, berjuang, dan bertahan, (karena) hidup adalah perjuangan dan perjuangan butuh pengorbanan. Walaupun bapak saya mampu membelikan sepeda motor, tapi saya kuliah naik sepeda ontel,” ungkapnya.

Tahun 1983, pasca menamatkan kuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, anak kedelapan dari sembilan bersaudara ini langsung bekerja di perusahaan swasta. Tak lama berselang, dibukalah rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan dikampusnya. Lalu, Djoko bersama sekitar 70 orang rekannya dari Fakultas Ekonomi UNS turut berjuang pada seleksi penerimaan pegawai disana.

Beruntung, Djoko berhasil diterima dan ditempatkan Direktorat Tata Usaha Anggaran yang mengurus bantuan luar negeri. Lalu di tahun 1988, Djoko diangkat menjadi kepala seksi di Solok, Sumatera Barat. Sejak itulah, pria yang hobi bermusik dan berolahraga ini ditempatkan di sejumlah unit vertikal Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, dari pulau Sumatera, Jawa hingga Kalimantan. Barulah di tahun 2004, Djoko menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, Jawa Barat. Tiga tahun kemudian, Djoko ditugaskan kembali ke Jakarta sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada waktu itu, lanjut Djoko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi yang dibuka oleh Presiden RI. Sebagai Kepala Bagian Umum, Djoko harus berkoordinasi dengan pasukan pengawal Presiden, Direktorat APK, serta sejumlah Kementerian teknis maupun non-teknis. “Harus betul-betul membangun komunikasi dan sinergi dengan Kementerian teknis maupun non-teknis.”

Bisa jadi, pengalaman berharga itulah yang mengantarnya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Palangkaraya pada 2009 silam. Saat bekerja di Kalimantan Tengah inilah, suami Dina Purnawati ini mengakui mendapat tantangan luar biasa dalam hidupnya. Perbedaan karakter antara dirinya sebagai pendatang dengan staf-stafnya yang penduduk asli terkadang menimbulkan konflik.

Menurut Djoko, tidak menutup kemungkinan terjadi benturan yang mengancam keselamatan jiwa. Meski demikian, Djoko tetap berjuang untuk bertahan menghadapinya sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Djoko sadar bahwa pemimpin layaknya manajer yang bertugas mencapai tujuan institusi melalui orang lain. Maka bagi Djoko, tantangan itu ibarat ‘bahan bakar’ untuk bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai pimpinan.

“Setiap manusia, begitu dia lahir, dia

punya harga diri, punya martabat, punya gengsi. Saya menggunakan pendekatan personal, seperti bapak kepada anak, kita tunjukkan kalau perilakunya salah karena tidak sesuai ketentuan. (Apabila) Tidak mau melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan itu, (pilihannya) harus keluar atau mengubah sikap,” tegasnya.

Dimanapun berada, tutur Djoko, dirinya selalu berjuang menanamkan sikap untuk menghargai orang lain. Djoko percaya bahwa dengan saling mencintai, menyayangi dan memberi satu sama lain maka hidup akan terasa lebih bermakna. “Hiduplah dengan cinta dan kasih sayang dan jangan sampai menyakiti. Insya Allah dengan begitu hidup kita ini berkah dunia dan akhirat.”

Bila ada pegawai yang berlaku kurang baik, maka ditelusuri penyebabnya bukan malah menghakiminya secara langsung. Caranya dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu *ing ngarsa sing tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani* (pemimpin harus menjadi contoh yang baik, bersedia berjuang bersama dan memberi dorongan bagi anak buahnya).

Corong kebijakan

Empat tahun berselang, Djoko mendapat amanah kembali ke pulau Jawa. Lulusan Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia ini diberi kepercayaan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) Provinsi Jawa Barat. Hal pertama yang dilakukan Djoko ialah melihat sarana fisik dan nonfisik dan berjuang melakukan pembenahan.

Ternyata, bangunan yang digunakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ini dikenal dengan sebutan gedung Dwi Warna, salah satu *heritage* Indonesia. Bangunan yang pada

Djoko dan keluarga.

Foto Dok. Pribadi

DJOKO WIHANTORO

TEMPAT, TANGGAL LAHIR: Boyolali, 23 Maret 1956

PENDIDIKAN: Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Solo (1983), Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2012)

RIWAYAT JABATAN: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I (2004-2007), Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2007-2009), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palangkaraya (2009-2013), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat (2013-sekarang)



tahun 1955 digunakan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika ini lantas direhabilitasi atas kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Purbalaka Kotamadya Bandung.

Selain membantu pelestarian cagar budaya, tahun 2015 lalu, Djoko berjuang mengantarkan KPPN Kuningan dan KPPN Purwakarta sebagai nominasi Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik. Djoko mengatakan bahwa pemilihan kedua KPPN di wilayah kerjanya ini tidak dilakukan dalam waktu singkat. “Prosesnya panjang, terbuka, dan berkelanjutan. Sasarannya bukan hanya mengejar juara, tetapi bagaimana meningkatkan kinerja dan inovasi KPPN, serta bermanfaat bagi mitra kerja dan pegawainya,” katanya.

Adapun sejumlah hal yang dijadikan bahan pertimbangan, yaitu pertama dengan melihat hasil pembinaan bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI). Lalu, melihat hasil *survey* kepuasan pelayanan, tata kelola kantor, pelaksanaan kegiatan selaku kuasa BUN sampai mengevaluasi ada atau tidaknya kasus pelanggaran disiplin di KPPN tersebut.

Kedua, memotret kebersamaan antar pegawai KPPN, termasuk satpam hingga

cleaning service-nya. Lalu, sejauh mana sinergi yang dilakukan KPPN dengan mitra kerja satker perbankan, serta satker dari unit vertikal Kementerian Keuangan lainnya. Ketiga, melakukan penilaian *e-performance* kepala KPPN saat memaparkan profil, evaluasi kinerja dan rencana kerja dalam rapat koordinasi wilayah.

Keempat, melihat inovasi KPPN yang dapat menunjang peningkatan kualitas layanan, baik internal maupun eksternal. Hasilnya, KPPN Purwakarta dengan inovasi *less paper* dan KPPN Kuningan dengan jargon Duta Hijau ditetapkan sebagai peringkat pertama dan kedua KPPc terbaik tingkat Kementerian Keuangan.

Dalam menghadapi masalah di kantor, ada hal menarik lain yang dilakukan Djoko, yakni dengan meminta setiap pegawainya untuk bisa bernyanyi dan memainkan alat musik. “Menyanyi itu bisa menghilangkan stress dan menyehatkan kita.” Djoko juga menekankan bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan tulus, baik, dan tenang, serta tetap bersyukur atas apa yang kita miliki.

Disamping itu, satu hal penting bagi Djoko ialah setiap manusia harus memiliki harapan dan cita-cita. Di mata Djoko, Kanwil dan KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah memiliki peran sentral bagi perekonomian daerah. Untuk itu, Djoko berharap, selain meningkatkan kualitas layanan, Kanwil dan KPPN harus berkoordinasi dengan para pimpinan daerah dan muspida sehingga dapat menjembatani *gap* kemauan mitra kerja dan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. “Kanwil dan KPPN (diharapkan) harus berani tampil di depan, serta mampu bertindak selaku agen informasi keuangan. Kedua institusi ini harus dapat menjadi ‘corong’ Menteri Keuangan dalam menyebarkan kebijakan serta menyediakan dan menyajikan data keuangan yang valid sekaligus terkini,” jelasnya.

Kembali pada keluarga Ayah dari Dwi Rahmawati sadar bahwa selama 31 tahun bekerja, dirinya harus berjuang demi merasakan kehangatan bersama keluarga maupun sanak saudara karena terpisah jarak dan waktu. Oleh karena itu, pria yang akan pensiun pada 1 April 2016 mendatang ini berencana menghabiskan waktu pensiunnya di Yogyakarta.

“Begitu saya pensiun saya ingin tenang. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara jauh di lereng gunung Merapi. Kalau ada uang, saya ingin jalan-jalan ke Eropa dengan istri. Kita juga akan lebih mendekatkan diri kepada agama. Mengalir saja sambil menikmati hidup,” urainya.

Teks lin Kurniati

Mengubah Tantangan Menjadi Kesempatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro optimistis perekonomian Indonesia 2016 akan cerah. Hal ini disampaikan Menkeu di hadapan sekitar 300 mitra kerja Kementerian Keuangan dari berbagai latar belakang, seperti kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pimpinan perusahaan nasional dan multinasional, para akademisi, pengamat ekonomi, serta pemimpin media cetak dan elektronik nasional dan internasional.

Dalam acara Stakeholders Gathering: Optimisme Perekonomian Indonesia 2016 pada Kamis (4/2) malam di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Menkeu mengungkapkan bahwa performa perekonomian tanah air sepanjang tahun 2015 memang tidak cemerlang seperti yang diharapkan. Namun, pemerintah optimistis, kita mampu bangkit dan akan bekerja lebih baik. “Tentunya kita sangat menginginkan Indonesia menjadi negara yang bisa menyejahterakan semua rakyatnya. Itu hanya bisa tercapai kalau kita tetap optimis, meskipun di tengah kondisi yang sangat berat,” kata Menkeu.

Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia dibayangi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang membuat kinerja ekspor terpengaruh. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia yang jauh di bawah perkiraan sempat menimbulkan gejolak di pasar saham, nilai mata uang, dan mempengaruhi indikator ekonomi lainnya. Harga minyak yang sempat di bawah 30 dollar Amerika Serikat per barrel, menurut Menkeu, benar-benar membuat *nervous* banyak negara dan pelaku ekonomi.

Namun, tahun yang penuh tantangan sekaligus menjadi momentum bagi perekonomian Indonesia. Berbagai terobosan di bidang pengelolaan fiskal dilakukan. *Pertama*, reformasi struktur anggaran dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, belanja produktif dan berkualitas, serta pembiayaan berkesinambungan. Kedua, kebijakan-kebijakan jangka pendek untuk mendorong kinerja ekonomi juga dirilis. Sepanjang September-Desember 2015, pemerintah telah meluncurkan tujuh paket ekonomi. Bahkan hingga bulan ini,

sudah ada sepuluh paket kebijakan yang dikeluarkan.

Mengubah tantangan

Menyambut tahun 2016, pemerintah menyiapkan tiga resep khusus untuk mengubah tantangan ekonomi global menjadi kesempatan. Ketiganya adalah menjaga daya beli masyarakat, menggairahkan investasi, dan mendorong kualitas belanja pemerintah. “Kombinasi ketiga resep ini yang diharapkan melahirkan optimisme perekonomian,” ujar Menkeu.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah mengawal tingkat inflasi. Pengendalian harga kebutuhan pokok seperti beras dan daging menjadi program yang diutamakan. Di samping itu, pemerintah juga akan menjamin pasokannya, sehingga masyarakat tidak kehilangan keyakinan terhadap pemerintah.

Sementara itu, untuk mendorong investasi swasta, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal. Di bidang perpajakan, misalnya, pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif pajak kepada pengusaha yang mau melakukan investasi di bidang infrastruktur dan industri manufaktur. Selanjutnya, perbaikan iklim investasi juga terus dilakukan. Tujuannya agar lebih banyak investor asing dan dalam negeri yang mengeluarkan uangnya untuk kegiatan investasi di sini.

Pemerintah juga berkeinginan mencetak lebih banyak wirausahawan. Untuk mencapai tujuan itu, tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diturunkan dari tahun lalu. Dengan tingkat bunga yang rendah di angka sembilan persen, pemerintah berharap dapat menyalurkan



Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah mengawal tingkat inflasi.

Foto Dok. Biro KLI

kredit mencapai 100 triliun rupiah. “Syarat negara maju harus banyak warganya yang jadi pengusaha,” ungkap Menkeu. Kesiapan untuk memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga KUR ditegaskan Menkeu malam itu.

Resep ketiga adalah mendorong kualitas belanja pemerintah. Kuncinya dimulai dari menghadirkan postur APBN yang sehat. “Itu sangat penting karena bisa menopang belanja pemerintah yang besar dan ujungnya juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu.

Soal belanja pemerintah, di samping meningkatkan kualitasnya, kebijakan belanja juga diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. “Salah satunya, pemerintah akan



Darmin Nasution
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian RI

“Ekonomi Indonesia tahun 2016 akan tumbuh lebih baik, investasi di bidang infrastruktur dan industri sudah mulai terlihat hasilnya. Demikian juga anggaran pemerintah. Belanja modal dan belanja barang sudah mulai berjalan lebih cepat penyerapannya dibandingkan tahun sebelumnya. Di bidang ekspor, Indonesia pada tahun ini akan melakukan konsolidasi untuk mencari pasar baru. Mempertimbangkan faktor-faktor itu, di tambah tentu saja dengan penyempurnaan paket-paket kebijakan, saya percaya ekonomi Indonesia akan lebih baik.”



Nurhaida
Dewan Komisiner OJK
merangkap Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal

“Bersamaan dengan tantangan yang dihadapi, pemerintah bersama dengan institusi di sektor jasa keuangan yang terkait sudah berkolaborasi untuk mengeluarkan paket-paket kebijakan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan menyambut baik program tersebut. Saya sangat optimis di tahun 2016 ini, dengan paket-paket yang ada, maka perekonomian kita bisa lebih baik dan memberikan dampak serta manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.”



Cara mudah bayar pajak.



mulai 1 JAN 2016 pembayaran pajak wajib menggunakan **e-billing**



Register sse.pajak.go.id atau via HP : *141*500#



Cetak Kode Billing



Bayar Pajak Anda



1500200



www.pajak.go.id

Channel Bayar

ATM, MiniATM, Internet Banking
Mobile Banking, Teller, Pos

memberikan bantuan yang lebih terarah dengan lebih banyak memberikan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan tunai bersyarat,” ujar Menkeu.

Selain ketiga resep itu, menurut rencana, tahun ini pemerintah juga akan memberlakukan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Menkeu menjelaskan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk memperbaiki basis pajak dan mengupayakan penerimaan lebih besar. Menurut Menkeu, “Kebijakan pengampunan pajak akan menjadi yang paling *critical* di tahun ini.



Destry Damayanti
Ketua Focus Group
Pembiayaan Pembangunan
dan Perbankan ISEI

“Tentunya pada tahun ini kita harapkan penyerapan anggaran bisa lebih baik, khususnya di kuartal pertama ini, sehingga peran pemerintah sebagai *counter cyclical* dalam ekonomi itu bisa berjalan. Kemudian juga, beberapa *leading indicator* yang kami lihat, apakah itu bisnis tendensi indeks trennya sudah mulai naik. *Consumer confidence index* juga mulai naik, termasuk penjualan mobil dan motor itu juga trennya meningkat. Saya pribadi sangat percaya diri bahwa pada tahun ini ekonomi kita akan mulai baik. Tentunya peran pemerintah sebagai *agent of development* juga akan sangat menentukan pada tahun ini.”



Perry Warjiyo
Deputi Gubernur
Bank Indonesia

“Kami dari Bank Indonesia (BI) melihat bahwa *outlook* untuk perekonomian Indonesia di tahun 2016 ini dan selanjutnya itu akan lebih baik. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan tetep terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari sisi Bank Indonesia, pelonggaran moneter yang kami lakukan terakhir dengan penurunan suku bunga BI itu juga akan mendukung optimisme dan pertumbuhan ekonomi.”

Ditemui di tempat terpisah, pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang diperbantukan untuk International Monetary Fund, Anggi Novianti mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) membawa dampak positif yang berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, eksposur anggaran untuk belanja subsidi bahan bakar minyak telah membuat APBN berada di titik yang *vulnerable*. “Ruang fiskal kita sangat terbatas karena porsi yang sangat besar untuk subsidi BBM,” kata Anggi.

Pengalihan subsidi BBM untuk belanja infrastruktur juga diapresiasi. Menurut Anggi, ruang fiskal untuk belanja yang bersifat membangun harus tetap dipertahankan. Manfaatnya nyata dan terasa, misalnya membuka lapangan kerja. “Pembangunan sarana infrastruktur juga membuat distribusi barang lebih baik, interkoneksi antardaerah lebih bagus, serta mengurangi biaya logistik,” ujar Anggi.

Yang menjadi catatan Anggi, alokasi belanja infrastruktur yang meningkat harus juga disertai dengan *monitoring* implementasinya di lapangan. Kualitas sarana dan dampaknya harus dapat dipastikan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.

Instruksi Presiden Jokowi untuk mempercepat proses pembangunan dipandang sebagai pesan yang sangat bagus dan perlu dijaga konsistensinya. “Dalam kondisi ekonomi global sekarang ini, kita harus banyak bergantung ke dalam aktivitas dalam negeri. Jangan terlalu banyak berharap dari aktivitas ekspor dan impor,” kata Anggi.

Senada dengan Menkeu, Anggi yakin kinerja perekonomian tahun ini akan lebih cemerlang. “Sebetulnya ekonomi kita masih *doing very well*, apalagi dibandingkan dengan negara lain. Bisa tumbuh hingga kisaran empat persen masih tergolong *outstanding*,” ujarnya.

Teks Dwinanda Ardhi

Pajak Emisi Gas Buang Dan Ketahanan Energi

Teks Joko Tri Haryanto,
pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI*

Pemerintah mewacanakan kembali pungutan pajak karbon (*carbon tax*) atas bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat. Dengan pengenaan pajak karbon ini, diharapkan nantinya pemerintah mampu mengontrol konsumsi BBM masyarakat agar tidak terlalu berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutannya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat tambahan dana untuk memperbaiki kualitas BBM ataupun menambah kapasitas kilang-kilang minyak yang sudah tidak produktif. Jadi secara spesifik, pemanfaatan pajak karbon ini tidak langsung ditujukan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagaimana ide Dewan Ketahanan Energi (DKE) sebelumnya.

Di banyak negara maju, praktek penerapan pajak karbon ini memang lazim dilakukan dalam bingkai DKE. Di Inggris, dari hasil penerapan pajak karbon pemerintah memiliki dana sekitar US\$1,5 miliar yang ditujukan bagi upaya mendukung eksplorasi sumur migas baru, sama halnya di Australia sebesar US\$1,8 miliar dan Norwegia sebesar US\$853 miliar. Sementara

di Timor Leste, dana DKE yang terkumpul mencapai US\$17 miliar (ditambah dengan *Petroleum Fund*) yang digunakan untuk dana cadangan energi. Dana cadangan energi tersebut di hampir semua negara yang sudah menerapkan, akan berfungsi sebagai bantalan subsidi demi meredam dampak fluktuasi harga minyak. Jika harga minyak naik maka pajak karbonnya akan diturunkan, sementara jika harga minyak turun maka pajak karbonnya akan dinaikkan.

Pajak emisi gas buang

Dari sisi penulis, ide pungutan DKE atau pajak karbon sebetulnya layak diapresiasi sebagai bentuk pemikiran pemerintah yang *concern* terhadap isu keberlanjutan sumber daya alam (SDA), di samping perbaikan eksternalitas negatif yang selama ini dihasilkan. Namun demikian, sekiranya berbagai ide tersebut perlu untuk diselaraskan dengan filosofi dasar demi kemudahan dalam implementasinya. Jangan sampai ide

yang bagus, hanya akan berakhir sebagai wacana semata, khususnya peluang penerapan pajak karbon.

Analisa yang paling utama adalah struktur harga BBM di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2856 Tahun 2015 tentang Harga Dasar BBM, maka di dalam komponen harga BBM terdiri atas margin keuntungan SPBU sebesar Rp270/liter, margin keuntungan Pertamina Rp324/liter, Pajak Daerah Rp100/liter, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sepuluh persen, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar lima persen.

Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa komponen BBM sudah sarat dengan pungutan, baik di level pemerintah pusat (dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai) maupun pemerintah daerah (pajak daerah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Jika nantinya pemerintah kembali akan memungut pajak karbon, prinsip dasar penerapan



Ilustrasi
Arfindo Briyan

pajak dimana “di satu obyek pajak yang sama tidak boleh dikenakan pajak berganda” akan dilanggar. Untuk itu, penulis merasa bahwa ide pengenaan pajak karbon bukan merupakan ide yang implementatif. Penulis justru menawarkan konsep pengenaan pajak emisi gas buang.

Dalam praktek penerapan di beberapa negara, pajak emisi gas buang awalnya lebih ditujukan untuk mengatasi permasalahan memburuknya kualitas udara perkotaan akibat kemacetan yang semakin menggila. Di Indonesia, Laporan *Castrol Magnatec Stop-Start Index 2014* menempatkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya dalam kategori kota dengan kemacetan tertinggi di dunia.

Diberitakan oleh survei Castrol, satu mobil di Jakarta dalam setahun bisa mengalami 33.240 *stop-start*. Jadi dalam setahun, mobil bisa *endut-endutan* dalam kemacetan sebanyak 33.240 kali. Kendaraan pun mengalami masa *idling* (diam tak bergerak) terlama di seluruh dunia. Di Indonesia total waktu *idling* adalah 27,22 persen. Itu artinya dari keseluruhan waktu berkendara, 27 persen habis terjebak dalam kemacetan. Selain Jakarta, kota paling macet lainnya adalah Istanbul, Turki dengan total 32.525 *stop-start*, dilanjutkan dengan Mexico City dengan total 30.840 *stop-start*. Posisi keempat diduduki oleh Kota Surabaya dengan total 29.880 *stop-start*, dilanjutkan dengan Petersburg, Rusia 20.040 *stop-start*, Moskow, Rusia 28.680 *stop-start*, Roma, Italia 28.680 *stop-start*, Bangkok, Thailand 27.480 *stop-start*, Guadalajara, Meksiko 24.840 *stop-start* dan terakhir Buenos Aires, Argentina 23.760 *stop-start*.

Hingga saat ini, pemerintah sudah menerapkan standar pengatur

emisi gas buang sebagai prasyarat di dalam perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya. Bahkan persyaratan mengenai emisi gas buang sudah menjadi aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam Pasal 64 paragraf 1 dikatakan bahwa emisi gas buang menjadi persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Pasal 65 juga menyebutkan bahwa emisi kendaraan bermotor harus diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor serta wajib tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Penetapan ambang batas tersebut diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis merasa pemerintah sebaiknya perlu untuk mengkaji lebih dalam kemungkinan pengenaan pajak emisi gas buang setiap tahunnya berbarengan dengan pengenaan PKB ataupun dijadikan pungutan pemerintah pusat sebagai dana ketahanan energi. Untuk kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas emisi gas buang akan dikenakan tarif pajak progresif, sebaliknya untuk kendaraan bermotor yang mampu mengelola emisi gas buang di bawah ambang batas akan memperoleh keringanan tarif pajak.

Seyogyanya pajak emisi gas buang kendaraan bermotor ini wajib di *ear marking*, untuk dikembalikan lagi kepada pembangunan infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan, infrastruktur transportasi umum, pengembangan bahan bakar alternatif, pengujian emisi, dan upaya perbaikan kualitas udara yang tercemar. Pemerintah daerah yang tidak menaati aturan penggunaan dapat

dikenakan sanksi dan hukuman misalnya tidak mendapatkan alokasi dana untuk periode selanjutnya.

Terkait ide tersebut, Indonesia dapat mencontoh Australia yang sudah terlebih dahulu menerapkan mekanisme pajak emisi gas buang. Meskipun awalnya menuai banyak protes khususnya dari para oposisi dan industriawan, pajak itu akan dikenakan pada polusi yang dihasilkan oleh korporasi. Sekitar 350 perusahaan ‘produsen’ polusi utama harus membayar sebesar 23 dolar Australia atau setara Rp220 ribu untuk setiap ton karbon yang mereka hasilkan. Sebagai gambaran, Australia sendiri merupakan salah satu negara produsen polusi per kapita terparah di dunia.

Dengan skema tersebut, Pemerintah Australia berharap tahun 2020, polusi karbon Australia setidaknya akan berkurang 159 juta ton/tahun dibandingkan dengan jika skema tidak diterapkan. Pengurangan polusi ini sama dengan melenyapkan sekitar 45 juta mobil dari jalanan. Rencananya, setelah tiga tahun berjalan, akan ada transisi dari pajak karbon ke skema perdagangan emisi berbasis pasar.

Demi tujuan perbaikan bersama Indonesia yang kita cintai, rumusan di atas tentu bukan hal mutlak yang tidak dapat diperdebatkan. Justru berbagai masukan yang konstruktif sangat dibutuhkan. Namun, semuanya harus bermuara pada satu tujuan bersama menciptakan transportasi Jakarta yang bersahabat dan bermartabat.

*) *Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*



ext.
2722 (hibah langsung)
2615 (hibah terencana)

email.
hibah.djppr@kemenkeu.go.id

website.
www.djppr.kemenkeu.go.id/hibah

Lulusan Harvard yang Memilih Pulang

Berbagai tawaran bekerja dan melanjutkan studi yang menggiurkan datang setelah Johannes Ardiant lulus dari program master jurusan Public Policy di John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Namun, Johannes memutuskan untuk kembali ke tanah air. Lama tinggal di luar negeri ternyata justru memberikan perspektif yang berbeda terhadap Indonesia.

Johannes saat ini menjadi Co-Founder sekaligus Chief Operating Officer sebuah *start up* yang berfokus di bidang kesehatan bernama Konsula. *Start up* yang didirikan pada akhir 2015 itu bekerja untuk membawa sistem kesehatan Indonesia memasuki era digital. Sebagai direktori dokter *online*, Konsula saat ini membantu pengguna menemukan dan mencari dokter-dokter yang sesuai dengan kondisi mereka dan melakukan reservasi *online* ke dokter tersebut. Di samping itu, Konsula menjadi platform *online* yang berfungsi sebagai fasilitas bagi dokter, klinik, atau puskesmas untuk mengelola praktik mereka dengan cara yang sistematis dan terjangkau.

Johannes mendirikan Konsula bersama dengan Shinta Nur Fauzia dan Ronald Wijaya, dua sahabatnya ketika menempuh studi di Amerika Serikat. Mereka melihat masa depan dunia kesehatan di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. “Kami melihat tren ke depan akan mengarah pada *telemedis*, karena

80 persen kasus yang masuk ke Konsula sebenarnya bisa ditangani tanpa perlu ke dokter,” kata pemuda kelahiran 12 September 1987 itu.

Prosedur *telemedis* ini sudah mulai berkembang di beberapa negara. Ke depan, proses konsultasi dengan dokter akan jauh lebih mudah karena tidak semua gejala harus diperiksa dengan kunjungan langsung. “Misalnya kalau ada masalah dengan gigi, dokter dapat memeriksa dengan *video call*,” ujar Johannes.

Berkembang pesat

Baru didirikan sekitar dua bulan, Konsula mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat dan praktisi di dunia kesehatan. Investor pun tertarik. Konsula mendapatkan pendanaan dari East Venture. Dimulai oleh tiga orang, saat ini Konsula sudah memiliki jaringan dengan 1200 dokter. Setiap bulan, Konsula melayani 30-40 ribu pengguna dan melayani permintaan *booking* dokter sekitar 20-30 janji per hari. Untuk memberikan layanan kepada pengguna, Tim Konsula beranggotakan 20 orang yang terdiri atas dokter, *programmer*, *customer service*, dan tim sales.

Untuk mengembangkan Konsula, Johannes dan rekan-rekannya mencoba menjawab setiap tantangan. Salah satunya adalah soal sumber daya manusia. Sebagai *start up* berbasis IT, Johannes mengungkapkan cukup sulit mencari sumber daya manusia yang bagus dan memiliki etos kerja tinggi. Tantangan



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

lain adalah regulasi. “Regulasi di bidang kesehatan masih banyak yang abu – abu. Misalnya rekam medis elektronik yang belum ada aturannya di Indonesia,” ujar Johannes.

Di samping itu, karena ketiga pendirinya bukanlah dokter atau praktisi di bidang kesehatan, Johannes mengaku awalnya menghadapi tantangan dalam menembus komunitas dokter di tanah air. Tim Konsula kemudian mencoba menjelaskan konsep layanan mereka kepada dokter-dokter muda yang mempunyai visi dan misi sama serta memiliki *passion* dalam isu *help care delivery* berbasis teknologi. “Para dokter muda ini yang membantu kami menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi profesi dokter di Indonesia,” kata Johannes.

Konsula masih memiliki jalan panjang dalam pengembangannya. Penambahan berbagai fitur baru seperti sistem notifikasi pasien, penyimpanan data rekam medis elektronik, serta konektivitas dengan laboratorium, radiologi dan apotek adalah beberapa agenda mereka. Di samping itu, Konsula saat ini juga tengah menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya membantu mereka mewujudkan *Jakarta Smart City*.

Kuliah di Harvard

Johannes mendapatkan kesempatan berkuliah di universitas terbaik di dunia dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana

Johannes
Ardiant.

Foto
Dok. Pribadi



Pendidikan (LPDP). Dia merupakan salah satu penerima beasiswa angkatan pertama. Johannes mengingat proses seleksi LPDP saat itu berlangsung cepat. “Proses wawancara bahkan dilakukan lewat Skype karena pada waktu itu saya sedang bekerja di Singapura,” ujarnya.

Johannes mengaku sempat merasa minder pada masa awal perkuliahan di Harvard. “Rasanya teman-teman di kampus adalah mereka yang mempunyai *achievement* yang sangat besar,” kata dia. Bukan hanya teman kuliahnya, civitas akademika yang ditemuinya di sana adalah tokoh-tokoh penting. “Ada dosen yang merupakan seorang mantan presiden dan juga kandidat perdana menteri. Lalu di sana saya juga bertemu dengan Bu Karen (Karen Agustiawan, Mantan Direktur Utama PT Pertamina) dan Pak Chatib (Chatib Basri, Mantan Menteri Keuangan),” kata Johannes.

Menempuh pendidikan di Harvard juga memberinya pengalaman tak terbeli karena berkesempatan mengikuti kelas akademisi tersohor yang sebelumnya hanya bisa Johannes baca karya-karyanya. Yang tak terlupakan juga adalah kesempatan mengikuti perkuliahan di Massachusetts Institute of Technology. “Semua pengalaman itu benar-benar menjadi *blessing* bagi saya,” kata Johannes.

Dari 50 orang yang mengambil jurusan Public Policy pada tahun akademik 2013-2015, hanya Johannes yang berasal dari Indonesia. Untuk urusan kebiasaan belajar, Johannes mengaku banyak terbantu dengan pengalamannya menyelesaikan pendidikan sarjana di National University of Singapore (NUS). Sebelumnya pada 2009, dia berhasil meraih gelar sarjana komputer dari NUS dengan beasiswa Sembawang Corporation

Scholarship.

“Ketika di Harvard, sebelum mengikuti kelas, kami harus mempersiapkan diri dengan membaca empat sampai lima jurnal. Di kelas, kami harus menyampaikan pendapat tentang topik yang dipelajari,” kenang Johannes. Bagi dia, waktu tidur tiga hingga empat jam sehari juga bukan masalah. Selama menempuh studi di negeri Singa, hal itu telah menjadi kebiasaan.

Alasan pulang

Sempat tinggal di Singapura dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun, Johannes kini memutuskan untuk kembali ke tanah air. “Saya harus kembali ke Indonesia dan mengerjakan sesuatu yang bisa berguna untuk banyak orang,” kata dia. Di samping itu, Johannes melihat apa yang dikerjakannya di Konsula adalah kesempatan yang penting. “Membangun *start up* dengan teman-teman sekarang mungkin menjadi kesempatan yang tidak datang lagi. Selama masih muda, mempunyai energi, dan belum ada tanggungan,” lanjutnya sambil tersenyum.

Di samping membangun Konsula, Johannes juga aktif membantu sebuah lembaga swadaya masyarakat mendirikan rumah sakit apung di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Ke depan, kapal rumah sakit ini diharapkan bisa juga memberikan layanan *telemedis* yang ingin dikembangkan oleh Konsula. Pada jangka panjang, Johannes bercita-cita terjun ke dunia politik dan memberikan kontribusi sebagai kepala daerah.

Teks Dwinanda Ardhi

Tax Amnesty

Teks Herry Setyawan,
Pegawai Komite Pengawas Perpajakan

Dalam beberapa hari ke depan pemerintah akan menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Nasional ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah kebijakan pemberian insentif penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan Wajib Pajak di masa lalu. Tujuannya adalah demi peningkatan kepatuhan sekaligus penerimaan di masa yang akan datang.

Hal lain yang juga penting, *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk masuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan. Penerapan *tax amnesty* juga diharapkan berdampak positif terhadap investasi dengan adanya perpindahan dana atau modal dari luar negeri ke dalam negeri.

Pemerintah berkeyakinan penerapan

pengampunan pajak di tahun 2016, akan memberi tambahan penerimaan pajak sebesar Rp150 sampai dengan Rp 200 triliun, dengan menggunakan asumsi perhitungan proyeksi penerimaan pajak non migas mengacu pada asumsi makro APBN tahun 2016.

Namun demikian, harus diingat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas tahun 2015 hanya sebesar Rp1.011 triliun, sedangkan target penerimaan pajak non migas tahun 2016 sebesar 1.318 triliun. Artinya, penerimaan pajak non migas pada 2016 harus tumbuh sebesar 30,36 persen.

Dengan kondisi perekonomian yang masih mengalami pelambatan dan belum beranjaknya harga barang komoditas terutama batubara, *Crude Palm Oil* (CPO), serta minyak dan gas (migas), maka target penerimaan pajak non migas tahun 2016 tidak mudah untuk dicapai apalagi dilampau. Terlebih lagi, pertumbuhan penerimaan pajak non migas tahun 2015

hanya 7,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan alamiah tahun 2015 juga hanya sebesar 8,09 persen.

Apabila kita melihat ke belakang, sebenarnya Indonesia pernah menerapkan kebijakan serupa. Misalnya pengampunan pajak pada 1964 dan 1994, *sunset policy* tahun 2008 dan penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*) tahun 2015. Implementasi sejumlah kebijakan tersebut dinilai kurang sukses karena tidak mendapat respon yang baik dari Wajib Pajak. Selain itu, belum dibarengi dengan perbaikan struktural yang mencakup sistem perpajakan, manajemen dan inventarisasi data, evaluasi dan *monitoring*, serta penegakan hukum.

Pengampunan pajak sebenarnya telah dilakukan oleh banyak negara antara lain Italia, Belgia, Perancis, India dan Afrika Selatan. Dari data dan informasi diketahui, belum ada negara yang benar-benar sukses dalam penerapannya.

Salah satu tujuan penerapan pengampunan pajak adalah menarik dana yang terparkir di luar negeri (*repatriasi*) untuk dapat diinvestasikan di Indonesia. Sebagai langkah awal, pada 2014 Menteri Keuangan secara proaktif melakukan diplomasi ke Singapura untuk meminta informasi data simpanan/aset warga Indonesia di Singapura yang diperkirakan mencapai 2000 triliun. Data ini akan digunakan sebagai basis data penggalan potensi pajak. Namun dalam perjalanannya, pemberian data dan informasi tersebut kurang terinventarisir dengan baik sehingga belum terbukti secara empiris dapat digunakan untuk menggali potensi penerimaan di tahun 2015.

Dari sisi Wajib Pajak, kebijakan *tax amnesty* harus dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Artinya, seluruh Wajib Pajak harus dipastikan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Tidak ada yang disembunyikan sehingga

mengurangi kesempatan timbulnya *moral hazard* dikemudian hari.

Keadilan dan kepastian hukum juga dibutuhkan oleh aparat pajak (*fiscus*) yang melaksanakan kebijakan ini. Jangan sampai di kemudian hari terjadi kriminalisasi terhadap pegawai pajak karena memberikan pengampunan pajak dianggap merugikan keuangan negara.

Salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengampunan pajak adalah meningkatnya kepatuhan formal dan material Wajib Pajak. Berkaca dari kebijakan *sunset policy* tahun 2008, dari data dan informasi yang ada dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di tahun 2009 belum menunjukkan lonjakan yang signifikan (54 persen).

Realisasi penerimaannya juga jauh panggang dari api. Dari rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp577 miliar, hanya tercapai Rp544.533 miliar atau sebesar 94,31 persen dengan tingkat

petumbuhan minus 4,65 persen. Hal ini seyogianya menjadi bahan evaluasi sebelum *tax amnesty* diberlakukan.

Berdasarkan *road map* Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, setelah tahun pembinaan di 2015. Untuk menghindari kebingungan masyarakat dengan penerapan penerapan *tax amnesty*, DJP sudah tentu harus segera melakukan penyesuaian terhadap strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan. Di samping itu, strategi publikasi yang masif perlu dilakukan agar informasi tentang penerapan *tax amnesty* lebih lengkap, jelas dan benar.

Penerapan *tax amnesty* akan memberikan banyak manfaat. Kita semua berharap agar kebijakan ini dapat berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Pemerintah Bebaskan PPN Rusunami

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik

Ilustrasi
Arfindo Briyan



Bagi sebagian warga ibukota dan kota-kota besar, impian untuk memiliki hunian bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Tidak terjangkau harga kepemilikan rumah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Terlebih lagi, harga kepemilikan rumah terus menanjak dari tahun ke tahun. Akibatnya, banyak keluarga yang berpuluh tahun lamanya hanya memiliki kemampuan untuk menyewa kebutuhan primer yang satu ini.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015 menunjukkan bahwa angka kekurangan pasokan rumah bagi penduduk Indonesia mencapai 7,6 juta unit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan berbagai cara agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Maka pada September 2015 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Salah satu poin dalam paket kebijakan tersebut adalah percepatan pembangunan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terkait dengan program sejuta rumah yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, maka sesuai hasil koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan telah menetapkan aturan mengenai insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan beberapa persyaratan. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) huruf j angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Standar Rusunami

Penetapan insentif terkait pembebasan PPN tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

269/PMK.010/2015. Pada Pasal 1 PMK Nomor 269/PMK.010/2015 telah diatur mengenai kategori rumah susun yang mendapatkan fasilitas bebas PPN sebesar 10 persen. Sehubungan dengan hal itu, unit hunian Rusunami yang perolehannya dibiayai melalui kredit maupun pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi, harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pertama, setiap hunian harus memiliki luas tidak kurang dari 21 m² dan tidak lebih dari 36 m². Kedua, pembangunan hunian harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, hunian yang akan dimiliki merupakan hunian yang pertama kali dimiliki dan harus digunakan sendiri sebagai tempat tinggal. Dengan demikian, hunian tersebut tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai rumah susun.

Selanjutnya terdapat hal lain terkait minimal standar Rusunami yang harus dipenuhi, yaitu tersedianya fasilitas kamar mandi dan dapur. Dalam hal ini, letak kamar mandi dan dapur diperbolehkan bersatu dengan unit hunian ataupun terpisah dengan penggunaan komunal.

Bebaskan PPN, Persyaratkan Pendapatan

Agar program ini tidak meleset dari sasaran, maka pemerintah memberlakukan sejumlah syarat. Pertama, batas penghasilan yang diperkenankan untuk mendapatkan Rusunami bebas PPN. Orang pribadi yang diizinkan untuk memperoleh Rusunami dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun besaran penghasilan dari calon pembeli Rusunami maksimal sebesar Rp 7 juta per bulan. Angka penghasilan tersebut adalah lebih tinggi dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu sebesar Rp4,5 juta per bulan.

Kedua, PMK Nomor 269/PMK.010/2015 tersebut mengatur batas atas harga jual Rusunami. Besaran harga jual yang ditentukan paling tinggi sebesar Rp250 juta. Dengan demikian,

nilai jual Rusunami yang diberikan fasilitas pembebasan PPN ini juga lebih tinggi dari pagu yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008, yakni maksimal Rp144 juta.

PMK yang ditetapkan pada 31 Desember 2015 ini selanjutnya mulai diberlakukan pemerintah pada 8 Januari 2016. Sejak tanggal berlakunya, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, baik yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 155/KMK.03/2001 maupun dalam beberapa aturan perubahan, terakhir dengan PMK Nomor 31/PMK.03/2008, seluruhnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Meskipun terdapat potensi penerimaan yang hilang akibat pembebasan pajak, kebijakan pembebasan PPN untuk Rusunami ini sudah sejalan dengan fungsi pajak dalam rangka mengatur (regulasi). Selain itu, kebijakan ini juga menjadi instrumen untuk mendorong sektor tertentu agar sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, yaitu menarik minat pengembang untuk membangun hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peraturan yang diterbitkan Menteri Keuangan ini diharapkan bisa memperlancar pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah. Pembebasan PPN diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk dapat mewujudkan kepemilikan rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah permintaan rusunami, dan berdampak pada keagairahan para pengembang untuk membangun rumah susun sederhana. Hal ini tentu memberi dampak positif pada ekonomi masyarakat.

Teks Budi Sulistyono

Petikan Dawai Tommy

Bagi Tommy Keraf, musik telah mempengaruhi kehidupannya. Uniknya, musik membantunya menumbuhkan ide-ide cemerlang saat bekerja.

01 Tommy Keraf.

Foto Arfindo Briyan

02 Grup Band Hearing Protection.

03 Aktif bermain musik sejak muda.

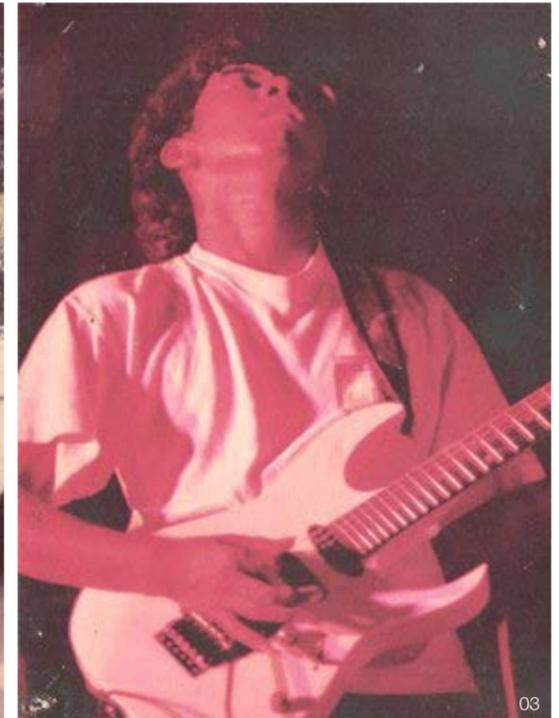
Foto Dok. Pribadi



01



02



03

Thomas Natalis Primordiartha Dile Keraf dibesarkan dari keluarga yang mencintai musik. Mulai dari ayah, ibu, hingga kakak-kakaknya memiliki kegemaran tersendiri terhadap musik, “Orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk bisa memainkan alat musik. Awalnya saya menyukai drum, lama-kelamaan setelah mulai *nge-band* jadi suka gitar,” jelas Tommy, panggilan akrabnya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (PKEM BKF).

Bermusik sejak SMA

Masa-masa Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa dibilang masa suka cita bagi sebagian orang. Begitu pula dengan Tommy yang merasa menemukan *passion*-nya pada dunia musik, khususnya alat musik gitar. Bersama teman-teman SMA, Tommy membentuk *band* beraliran *rock* bernama “Hearing Protection.” Saat masih duduk di bangku SMA, “Hearing Protection” sudah beberapa kali menjuarai kompetisi *band* dan diminta unjuk gigi di berbagai kampus.

Bukan hal biasa bila *band* sekolah hanya bertahan seumur jagung. Namun berbeda dengan Tommy dan kawan-kawan. Sampai saat ini, “Hearing Protection” masih eksis bahkan tahun lalu sempat dua kali mengisi acara di Hardrock Café Jakarta. Saat ditanya apakah pernah vakum dalam bermusik, Tommy hanya terhelak, “Cara saya *refresh* itu melalui musik. Apalagi kalau sudah

padat-padatnya pekerjaan. Ide ada di sini (menunjuk kepala) tapi *nggak* bisa dituangkan ke bahan dengan cepat. Setelah saya main gitar sebentar lalu dibaca lagi materinya, baru ide-ide itu bisa keluar,” kata ayah dari Valeria Euphrasia Vidya Pravinia Keraf ini.

Kecintaan Tommy terhadap musik membuatnya bersemangat untuk mengoleksi gitar. Total keseluruhan ada 26 gitar tersimpan apik di rumahnya. Dari seluruh koleksi, ada satu yang menjadi favoritnya. “Favorit saya RG550 Ibanez, produksi Jepang. Saya seneng banget sekarang Ibanez sudah buka pabrik di Indonesia. Saya dukung itu, akhirnya industri kita diakui,” ujar penggemar grup Megadeth ini sumringah. Tommy mengakui, kegemaran mengoleksi gitar sejak SMA dikarenakan “gatal mata”. Beberapa gitar diantaranya ia dapatkan dari situs jual beli eBay dan Kaskus.

Bermula dari tangga

Tangga darurat itu jauh dari kesan senyap. Riuhan ramai perbincangan beberapa pria mewarnai situasi di sana. Sesekali terdengar alunan petikan gitar. Bukan hanya sekedar obrolan santai yang melantur ke mana-mana, Tommy bersama rekan-rekannya membicarakan kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal. Sungguh mengingatkan pada sastrawan kenamaan yang selalu mendapatkan ide karyanya dari sebuah warung kopi sederhana.

Pria kelahiran Jakarta, 21 Desember 1971 ini menganggap bahwa ide cerdas untuk melancarkan pekerjaan mereka tidak melulu berasal dari ruang rapat. Dengan pendekatan emosional

yang baik, keakraban dalam sebuah tim kerja akan terbentuk maksimal. Contohnya dengan diskusi yang selama ini ia lakukan di tangga darurat gedung R.M. Notohamiprodjo sebagai area merilekskan pikiran. “*Gue* sama temen-temen suka ke tangga untuk sekedar *ngobrol*, bahkan *ngobrolin* kerjaan juga di situ. Karena suasananya santai, jadi teman-teman bebas mengungkapkan ide. Ide dari tangga itu yang lalu kita bawa ke rapat formal,” jelas Tommy.

Tommy menekankan bahwa sifat egaliter bisa diterapkan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Bawahan tidak perlu takut pada atasan. Begitu pula atasan yang tak perlu menjaga jarak yang berlebihan hingga menjurus ke sikap otoriter kepada bawahan. “*Gue* suka (bekerja) di PKEM ini (karena) timnya kuat banget. Terutama saat penyusunan asumsi makro bersama teman-teman. Semuanya kompak,” ujarnya. Kedekatan ini sangat ia rasakan saat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar BKF dari tahun 2011 hingga 2015.

Meneladani Ayah

Saat mendengar nama “Keraf”, ingatan kita pasti tertuju pada salah satu tokoh bahasa yang sering ditemui di buku pelajaran bahasa Indonesia semasa sekolah. Tommy adalah anak pertama dari Gorys Keraf, ahli bahasa kenamaan Indonesia yang juga seorang doktor linguistik Universitas Indonesia. Menjadi anak seorang ahli bahasa menjadi beban tersendiri bagi Tommy kecil. Semasa sekolah, guru maupun ibunya suka protes jika nilai pelajaran bahasanya tidak memuaskan. “Ayah saya sih cuek, ibu yang sering mengomel kalau nilai jelek. Di sekolah kadang suka *dibandingin* (sama ayah). Akhirnya harus *extra effort* belajar bahasa,” kenang penggemar grup musik Godbless dan Kla Project ini.

Tommy mengenang almarhum ayahnya sebagai orang yang keras. Di balik itu, ayah dan ibu Tommy memperhatikan kegiatan dan keseharian anak-anak mereka. Suatu ketika saat Tommy masih di bangku SMA, kondisi Jakarta kala itu sering terjadi tawuran. Orang

tua Tommy kemudian membelikan alat musik untuknya seraya berkata, “Kami lebih nyaman kalian semua (Tommy dan teman-temannya) ada disini. Kita mau (mengeluarkan) biaya mahal juga *enggak apa-apa*, tapi kami tahu kalian ada di rumah.”

Mengharapkan penerus

Selama hobi bermain gitar bisa mendukung karier Tommy sebagai abdi negara, ia tidak akan menyia-nyai kesempatan itu. Keuntungan yang ia dapatkan adalah *refreshing* dari kepenatan di kantor. Tommy berharap, ke depan ia ingin memiliki penerus yang bisa melanjutkan semangatnya dalam bermusik, khususnya bermain gitar. “Saat ini saya ingin mengarahkan anak saya untuk mencintai musik. Sekarang dia sudah menunjukkan minat menyanyi. Rencananya nanti akan diajarkan alat musik,” ujarnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Keluarga Tujuan Akhir



Seandainya kita, Pak Salim muda menjalani rutinitasnya sehari-hari. Saat itu, Jakarta belum sepadat sekarang, sehingga ia bisa memulai aktivitasnya berangkat kerja saat matahari telah terbit dan kembali jauh sebelum matahari mulai tenggelam. Meski lelah saat kembali ke rumah, Pak Salim dengan bersemangat menyambut beragam tuntutan perhatian dari keenam orang anaknya. Pada gilirannya, saat Pak Salim telah menua, keluarganya hadir bersamanya.

Siapa pun tahu, kota-kota besar, termasuk Jakarta merupakan kota tujuan banyak orang. Beragam cita dan harapan disandarkan oleh para penghuni Ibukota. Setiap orang saling berlomba dan bersaing untuk memperoleh yang terbaik. Berharap usahanya berujung pada kesuksesan. Boleh jadi, kita adalah salah satu diantaranya.

Berbeda dengan Era Pak Salim, sebagian besar orang telah meninggalkan rumah sebelum matahari terbit dan pulang setelah malam telah larut. Bukan hanya kemacetan, alasan target pekerjaan atau

juga target kehidupan jadi pertimbangan. Sebagian besar waktu didekasikan untuk merealisasikan sederet target. Ada kalanya diburu waktu dan ketergesaan menjadi hal yang biasa, sehingga kadang kesempatan untuk beristirahat, beribadah, dan bersosialisasi hanya diberi porsi terbatas.

Bukanlah suatu kesalahan untuk memperoleh kesuksesan lewat gelimang materi. Apalagi jika itu diraih dengan cara yang baik, serta menempatkannya secara proposional dan diperuntukkan dengan tujuan yang jelas. Namun tak jarang, motivasi untuk mencapai kesuksesan justru mengesampingkan atau bahkan secara tidak sadar, membenamkan urusan penting lainnya, yaitu keluarga.

Dalam kondisi seperti sekarang, membangun dua hal secara bersamaan memang bukan hal yang mudah. Membangun kemakmuran bagi keluarga, sekaligus mewujudkan keluarga dengan kedekatan yang erat satu sama lain, tentu memerlukan pondasi yang baik dalam kerangka perhatian yang cukup. Tidak semua orang mampu menjawab dengan

cepat, mana yang lebih prioritas di antara keduanya, atau mungkin keduanya telah berada dalam posisi seimbang.

Sementara saat usia terus menapaki waktu, kelemahan fisik tidak lagi dapat kita hindari. Berkurang kemampuan kita untuk bisa mengatasi segalanya sendiri, Saat itulah, kita mulai menyadari arti penting keluarga. Mereka yang dulu hanya memperoleh sedikit waktu dan se porsi kecil perhatian kita.

Maka, belajar dari perjalanan hidup Pak Salim, perhatian keluarga menjadi sangat berarti di hari tua. Bukan lagi materi, sebab ia hanya sekadar alat yang tidak bisa dibandingkan nilainya dengan keluarga. Di sana menanti anak-anak sebagai masa depan, yang akan berganti peran dengan orang tua secara alami. Kita tentu berharap, kehangatan dan perhatian mereka dapat terus kita rasakan, terlebih saat kita benar-benar membutuhkannya.

Teks Titi Susanti



“The Big Short”: Film Berat yang Terasa Ringan

“The Big Short”... Besar Pendek? Bukan. “Short” di sini adalah istilah dalam dunia investasi, yang berarti pembelian suatu instrumen investasi dengan harapan nilai investasi tersebut akan jatuh di masa depan. Jadi, secara harfiah, “The Big Short” berarti melakukan “short” secara besar-besaran. “The Big Short” adalah film tentang dunia investasi yang kaya akan istilah-istilah teknis (yang bisa jadi bikin kita bingung) tetapi tetap menarik untuk diikuti.

Anda ingat krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2007 lalu? Film ini mengambil waktu beberapa tahun sebelumnya, saat seorang manajer investasi bernama dr. Michael Burry (Christian Bale) memprediksi bahwa pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Amerika Serikat akan kolaps dan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi nasional. Ia menemukan bahwa pasar KPR selama ini ternyata ditopang oleh kredit-kredit

berisiko. Pemerintah dan para investor di Wall Street sekian lama menyembunyikan hal ini dengan menerbitkan produk investasi rekaan dan memberi predikat kredit yang tinggi, demi mempertahankan stabilitas pasar KPR.

Berbekal data yang ia miliki, Michael mengalihkan seluruh dana dari para investornya untuk membeli *credit default swap*, atau semacam asuransi terhadap utang, sehingga jika nantinya kredit-kredit KPR ini *default*, ia justru akan memperoleh keuntungan. Di tengah opini yang kuat bahwa pasar KPR akan selalu stabil dan tidak mungkin kolaps, sebagian besar investor menganggap ini tindakan yang bodoh. Tetapi, beberapa investor lain seperti Jared Vennett (Ryan Gosling), Mark Baum (Steve Carell), dan Ben Rickert (Brad Pitt) melihat bahwa prediksi Michael bisa jadi benar. Mereka pun mengambil tindakan yang sama dengan mempertaruhkan dana yang mereka miliki.

Pusing memahami sinopsis barusan? Jangan. Hal mengasyikkan dari menonton

film-film tentang investasi seperti “The Big Short” adalah saat kita mengikuti lika-liku para tokohnya mencari kesempatan dalam kesempatan. Adam McKay (sutradara dan penulis naskah) dan Charles Rudolph (penulis naskah) memahami benar caranya memaksimalkan keasyikkan tersebut. Melalui dialog yang cekatan dan penokohan yang menarik, ditambah penampilan yang memukau dari jajaran aktornya, mereka menyulap “The Big Short” menjadi drama-komedi yang tidak ambil pusing dengan hal-hal teknis dalam plotnya. Semua dirangkum ringan dan sederhana.

Film ini menjadi cerminan betapa manusia, sebagai *homo economicus*, selalu mengusahakan keuntungan bagi dirinya sendiri bahkan saat orang lain tertimpa kerugian. Pada akhirnya, lebih dari sekadar menghibur, “The Big Short” juga mengedukasi.

Peresensi Akbar Saputra

Mengakrabkan Diri Dengan Togeian

Menyandang status sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki panorama alam yang menakjubkan. Potensi tersebut menjadi nilai tambah dalam menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk berkunjung. Lekuk bentang alam yang tercipta menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia unik dan tak kalah indah dibandingkan negara lain.

Setiap pulau di Indonesia menawarkan kemolekan masing-masing. Sebut saja Laut Timur yang menyimpan surga keindahan bawah laut. Ada pula kepulauan Raja Ampat yang tersohor dengan gugusan pulau nan memesona. Menyelam di Wakatobi juga bisa menjadi pilihan bagi mereka yang menggandrungi wisata bahari.

Taman Nasional Kepulauan Togeian yang diresmikan tahun 2004 tergolong destinasi wisata baru yang layak diperhitungkan. Kepulauan yang kaya akan berbagai biota laut yang dilindungi ini termasuk dalam gugusan Teluk Tomini. Kepulauan Togeian terdiri dari beberapa pulau yakni Pulau Kadidiri, Pulau Papan dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.

Untuk menuju Kepulauan Togeian, kita bisa menumpang kapal feri dari kota Gorontalo. Dalam keadaan normal, pengunjung dapat tiba di Pulau Wakai setelah menempuh perjalanan selama sebelas jam. Dari sana, pengunjung dapat melanjutkan petualangan ke Pulau Kadidiri dengan menggunakan *speedboat*. Di pulau ini sudah ada beberapa penginapan dengan beragam keunggulan yang bisa dipilih sesuai *kocek*.

Suasana di Kepulauan Togeian sangat damai karena jauh dari hiruk pikuk kota. Kondisi inilah yang memikat pengunjung yang ingin mengistirahatkan pikiran. Terumbu karang yang mewarnai bawah laut Togeian masih sangat sehat dan alami. Ikan-ikan yang berenang dengan leluasa membuat kita seolah menyaksikan akuarium raksasa. Apabila menyelam di Togeian, kita akan menemukan bangkai pesawat peninggalan zaman Jepang yang dibiarkan tenggelam dan tidak diangkat hingga saat ini. Titik penyelaman di sini banyak dimanfaatkan untuk penelitian oleh pihak asing atau dalam negeri.

Penduduk asli Kepulauan Togeian adalah Suku Bajo Suku ini

mendiami rumah-rumah yang dibangun di atas perairan. Tempat tinggal yang mereka berpondasi kayu berdiri tegak di atas air dan karang tanpa takut terombang-ambing ombak. Wilayah yang mereka huni dihubungkan dengan jembatan papan antar pulau yang membentang sepanjang lima kilometer. Pulau tersebut dinamai pulau papan karena didominasi bangunan dari papan kayu.

Kebanyakan penduduk setempat menggantungkan hidup dengan menjadi nelayan. Mereka handal menangkap ikan dengan cara menombak. Cara menombaknya pun tak sembarangan. Penangkap ikan harus terlebih dahulu menyelam di kedalaman sekitar sepuluh meter tanpa bantuan alat selam dan alat pernapasan. Saat ini, desa-desa suku Bajo sudah mulai dialiri listrik. Masyarakat di sana sudah ada yang mengenyam bangku pendidikan.

Hutan mangrove di Kepulauan Togeian patut ditelusuri. Di sini, kita bisa menyerup udara segar yang menyeruak dari rimbunnya semak mangrove. Kicau burung bersahut-sahutan melengkapi kedamaian di hutan ini. Jika sudah puas mengelilingi hutan mangrove, jangan lupa mampir ke danau ubur-ubur yang berair payau. Ubur-ubur yang biasa hidup di air laut, bisa kita jumpai di sini. Namun, aktivitas berenang tidak disarankan karena sengatan ubur-ubur bisa saja membahayakan.

Teks Herlambang Suko Prayogi,
Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

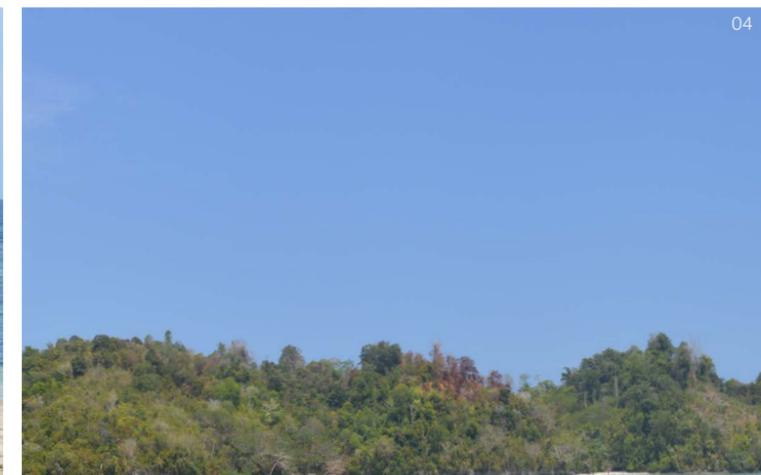
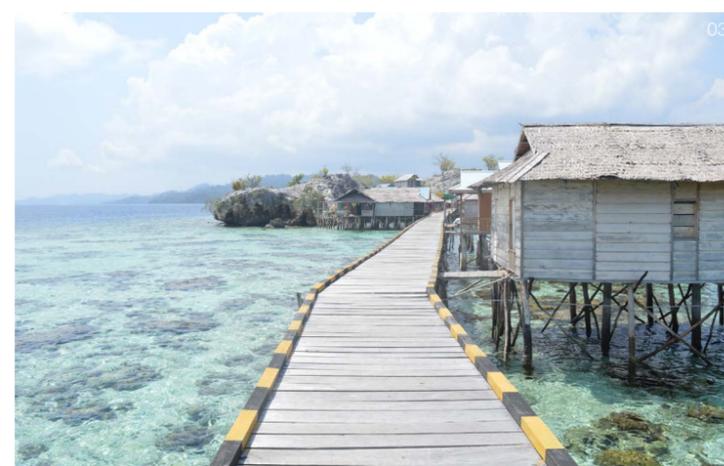
01 Sunset di Pulau Kadidiri.

02 Pulau Kadidiri.

03 Perkampungan Suku Bajo.

04 Terumbu Karang Pulau Papan.

Foto Herlambang Suko Prayogi





Masih Optimis

Membangun rasa optimis berarti membangun sebuah harapan bahwa ke depan lebih baik.

Foto
Twitter
@aa_dece

Tampak ada yang berbeda dalam *stakeholders gathering* bertajuk 'Optimisme Perekonomian Indonesia 2016' yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Kamis (4/2) lalu. Bila sejumlah institusi seringkali membuat acara serupa berbentuk seminar atau *workshop*, lain halnya pada acara yang diusung bersamaan dengan peluncuran majalah Media Keuangan versi *mobile apps* untuk Ios dan Android malam itu.

Ialah Denny Chandra, seorang pelawak, aktor, sekaligus pembawa acara yang sukses membuat acara ini terasa lain dari yang lain. Bermodal mimik serius dengan gaya lelucon segar, pria kelahiran 1 Januari 1966 ini mampu mengubah atmosfir yang mulanya terkesan tegang

menjadi lebih santai bahkan mengundang tawa. Diskusi ini memang sengaja dikemas serupa dengan *talk show* yang rutin dipandu Denny bersama Komeng, Jarwo Kwat, dan Cak Lontong.

Keberhasilan lulusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung ini menciptakan suasana segar pada setiap acara yang dibawakannya bukan diraih dalam waktu singkat. Saat masih duduk di bangku kuliah, Denny bersama sejumlah mahasiswa dari fakultas sastra universitas Padjajaran dan FISIP universitas Katholik Parahyangan membentuk kelompok Padhayangan.

Mulanya, aktivitas kelompok yang dibentuk Desember 1982 ini sebatas menggelar *cabaret* yang lucu namun lambat laun Padhayangan mulai aktif sebagai penyiar radio humor OZ di kota kembang. Inilah awal mula karier ayah dari Putri Adristi Arinaya dan Laskar Muhammad Akhtar di dunia *entertainment*.

Keberhasilan Padhayangan mengusung lagu-lagu parodi kemudian mengantarkan mereka masuk dalam dapur rekaman hingga disunting oleh salah satu stasiun televisi swasta. Seiring waktu, kelompok Padhayangan pecah, lantas pria yang hobi memelihara binatang di rumahnya ini bergabung dengan P-Project. Berkat P-Project, Denny terus mendulang sukses membawakan beberapa program acara di layar kaya serta membintangi sejumlah film layar lebar.

Ketika disinggung soal optimisme pada tanah air, Denny percaya bahwa Indonesia akan lebih baik ke depan. "Saya masih optimis, karena optimisme merupakan modal awal kita mengarungi (tantangan) ke depan. Kita tidak pernah tau seperti apa di depan. (Disamping itu) Penting, satu dengan yang lain saling berhubungan, membuat sinergi (bersinergi) dengan kesadaran bersama (mewujudkan rasa optimis). Bagaimanapun, *Together is power,*" ungkapnya.

Teks lin Kurniati



Bung Piskal

CERITA: FINDO GAMBAR: BIMO





MEMPERINGATI HARI RAYA NYEPI
TAHUN BARU SAKA 1938

9 MARET 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA